



LAPORAN TIGA TAHUNAN



Yayasan
Kesehatan
Perempuan

2018 - 2021

DISAMPAIKAN PADA RAPAT ANGGOTA
YAYASAN KESEHATAN PEREMPUAN

Jakarta, Agustus 2021



SAMBUTAN

Ketua Dewan Pengurus YKP

Herna Lestari

Pada kepengurusan periode tahun 2018-2021, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan amanah yang termaktub dalam rencana strategi organisasi. Di tahun 2019, Indonesia memasuki Tahun politik “Pemilu Serentak” menyebabkan tertundanya beberapa aktivitas YKP. Ketika kemudian aktivitas YKP mulai berjalan baik, di tahun 2020 dan berlanjut ke tahun 2021, Indonesia memasuki situasi pandemik COVID-19 yang cukup parah. Kondisi ini jelas mempengaruhi pelaksanaan program-program YKP. Banyak kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan advokasi dan aktivitas-aktivitas di lapangan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. YKP merubah strategi kegiatannya dengan menyesuaikan kondisi yang ada seperti memaksimalkan pemanfaatan metode daring dan pelibatan kelompok dampingan di daerah.

Periode ini juga merupakan tahun-tahun duka bagi YKP. YKP kehilangan dua tokoh penting YKP, dr. Kartono Mohamad (Pembina YKP Periode 2018-2021) dan dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG (Pendiri YKP dan Pengawas YKP periode 2018-2021).

Beberapa program, seperti program MAMPU dan program IPAS, juga berakhir di periode ini. Namun, dapat dipastikan untuk periode kepengurusan berikutnya akan ada program-program dengan sumber dana yang baru.

Melalui berbagai program yang dilakukan sepanjang tahun 2018-2021, YKP melihat adanya berbagai capaian keberhasilan maupun kelemahan yang menuntut kita untuk berefleksi dan menyusun arah dan rencana YKP ke depan. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban Dewan Pengurus YKP sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar YKP, sekaligus sebagai sarana refleksi agar YKP dapat lebih meningkatkan kualitas kerja di masa mendatang.



REFLEKSI

EKSEKUTIF DIREKTUR YKP

Nanda Dwinta Sari

Rentang waktu tiga tahun 2018-2020 bisa dikatakan bukanlah tahun-tahun yang mudah bagi banyak pihak termasuk Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Dimulai dengan kita menghadapi tahun politik "Pemilihan Umum" tahun 2019 yang cukup bergejolak, memotret kekuasaan yang timpang dan dapat dikatakan masih jauh dari kata Demokrasi. Apa yang terjadi adalah rakyat hanya mengandalkan pemimpinnya yang dimana seharusnya rakyat pemegang kuasa dalam sebuah demokrasi. Tantangan ini pun diikuti dengan munculnya pandemi COVID 19 pada awal tahun 2020 dimana tidak pernah terlintas dalam pikiran akan terjadi sebuah pandemi yang melanda hampir semua bagian di dunai ini. Kehidupan seakan 'berhenti' aktivitas diluar rumah dibatasi, semua orang dihimbau tetap di dalam rumah dan memaksa umat manusia untuk cepat berfikir dan menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup. Sebuah cara pandang baru pun lahir, dikenal dengan sebutan 'NEW ERA' yang melahirkan strategi baru dalam bekerja, berkolaborasi, memobilisasi dan advokasi. Pandemi juga berdampak pada jatuhnya perekonomian yang memaksa banyak orang kehilangan mata pencaharian, tertundanya proses belajar di sekolah juga layanan kesehatan yang keos karena jumlah kasus COVID 19 yang tinggi.

YKP bersama-sama mitra kerjanya termasuk kelompok dampingan memiliki tanggungjawab moral untuk berperan aktif melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID 19, bantuan seragam APD bagi para petugas kesehatan yang tidak menjadi prioritas seperti bidan dan sedikit donasi kepada teman-teman jaringan yang terpapar COVID 19. Kami juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang melindungi staff dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja-kerja YKP seperti kebijakan bekerja secara online, menyediakan pemeriksaan suhu badan, test swab antigen, masker dan sanitizer dalam setiap pertemuan. rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area kantor maupun area kegiatan YKP dan ketentuan lainnya yang secara sadar kami adopsi guna tetap mencegah penyebaran virus COVID 19.

Terlepas dari virus COVID 19, salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan diantisipasi adalah efek pada populasi terutama di negara-negara berpenduduk terpadat, termasuk Indonesia. Negara, masyarakat, keluarga, dan pada akhirnya perempuan di Indonesia harus menanggung beban yang multidimensi akibat tidak direncanakan kehamilan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Perempuan harus menanggung kekerasan atau kelalaian

yang dipaksakan secara struktural dengan negara. Hal ini terutama disebabkan oleh terganggunya akses terhadap alat kontrasepsi jangka pendek yang paling banyak digunakan di Indonesia. Diperkirakan akan ada penurunan hingga 47% dalam penggunaan kontrasepsi dan sebagai akibatnya 15-20% tidak direncanakan kehamilan pada tahun 2021 (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 2020).

Kerja YKP selama tiga tahun 2018-2021 berdasarkan apa yang dimandatkan dalam rencana strategis (renstra) 2018-2021, dimana dua fokus kerja organisasi yaitu pada isu strategis kemasyarakatan dan isu strategis kelembagaan. Pada isu strategis kemasyarakatan YKP mendorong terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan pemajuan hak asasi manusia yang dapat dicapai dengan mengupayakan kesetaraan relasi kuasa (equal power) dan akuntabilitas negara untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan bagi semua, termasuk bagi perempuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksinya secara berkualitas dan aman. Dengan cara mendorong terbitnya perundang-undangan atau regulasi sebagai sistem hukum yang menjamin bagi pemenuhan HKSR baik di tingkat nasional dan daerah, seperti 3 Peraturan Bupati, 2 Perda terkait perlindungan anak dan perempuan termasuk pencegahan perkawinan anak.

Pendidikan penyadaran juga dijalankan secara intensif kepada publik dan sektor swasta agar kepedulian publik terhadap pentingnya HKSR dan dukungan sektor swasta juga menguat. Pendidikan HKSR menjadi kapasitas yang wajib diberikan dalam setiap program yang dijalankan YKP sehingga YKP semakin berpengalaman yang menjadikan YKP sebagai rujukan dalam pendidikan HKSR. Pendidikan HKSR melibatkan kelompok masyarakat yang inklusif mulai dari orang muda hingga lansia, perempuan agar terjadinya perubahan perilaku hidup sehat dan sadar hak serta secara afirmatif mengupayakan pelibatan laki-laki agar memiliki kepedulian dan berperan dalam mewujudkan pemenuhan HKSR khususnya pencegahan perkawinan usia anak.

YKP juga terus berupaya memperkuat jejaring CSO agar aktif berinteraksi dengan penentu kebijakan dan sebagai kekuatan kolektif menyuarakan pemenuhan HKSR. Selain bekerja bersama jaringan YKP juga terlibat menjadi salah satu penyelenggara pada konferensi regional terkait HKSR Asia Pacific Conference Sexual Rights and Reproductive Health (APCSRHR) ditahun 2019 dan 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Pengurus YKP: Herna Lestari

REFLEKSI

Direktur Eksekutif YKP: nanda Dwinta Sari

TENTANG YKP	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
CAPAIAN	6
ISU STRATEGIS KEMASYARAKATAN	7
ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN	20
KEBERLANJUTAN PROGRAM	27
PENGELOLAAN KEUANGAN	28
RENCANA SELANJUTNYA	29
PEMBELAJARAN & KESIMPULAN	30
LAMPIRAN	31

TENTANG YKP

YKP didirikan pada tanggal 1 Juli 2001 di Jakarta oleh para aktivis yang peduli terhadap kondisi kesehatan reproduksi dan perempuan di Indonesia dengan cara merespon langsung berbagai isu sekitar kesehatan reproduksi dan hak-hak seksualitas perempuan.

Rencana Strategi YKP 2018-2021

Pada tahun 2019 yang menjadi acuan kerja YKP adalah rencana strategi 2018-2021.

Visi

Menjadi organisasi yang mempelopori "Terwujudnya suatu kondisi masyarakat Indonesia dimana setiap perempuan terpenuhi hak-hak kesehatannya khususnya hak-hak reproduksi dan seksualitas tanpa diskriminasi, perlakuan yang buruk dan tekanan, serta kekerasan dari pihak manapun sehingga terbebas dari kesakitan dan kematian".

Misi

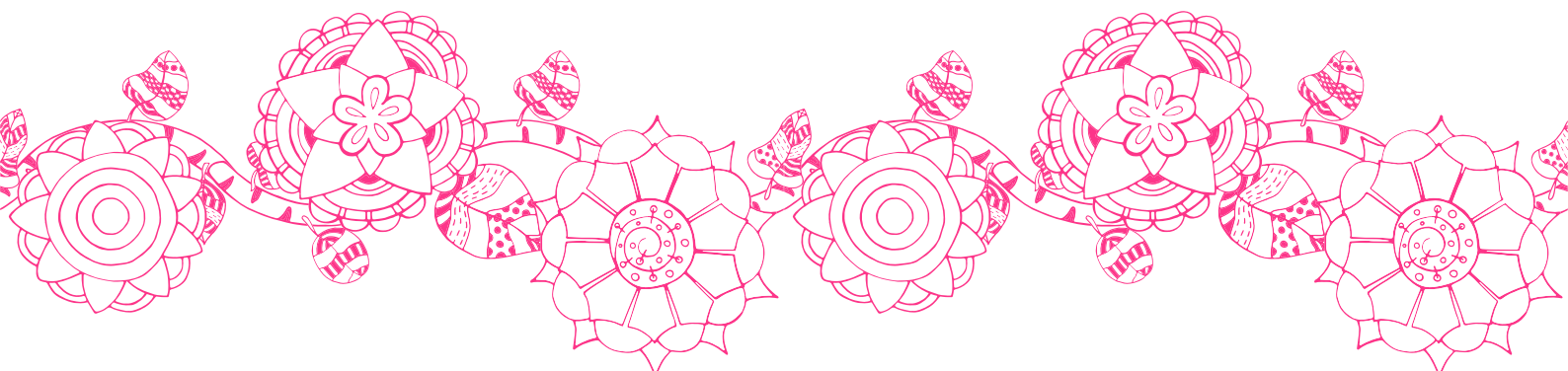
1. Mengupayakan terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan untuk menikmati hak seksualitas dan reproduksinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Mengupayakan terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terjangkau bagi perempuan tanpa diskriminasi.
3. Meningkatkan pemahaman hak-hak reproduksi dan persamaan derajat perempuan dan laki-laki secara aktif sehingga mampu memenuhi kesehatan reproduksinya.
4. Mendorong berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk menurunkan Angka Kematian Ibu

Bagaimana Kami Bekerja

Kerja bersama/mitra dan berjejaring menjadi strategi penting agar YKP dapat aktif berinteraksi dengan penentu kebijakan dan menjadi bagian dari kekuatan kolektif menyuarakan pemenuhan HKSAR yang menjadi visi organisasi.

Dengan Siapa Kami Bekerja & Apa Yang Kami Kerjakan

YKP banyak bekerja dengan kelompok orang muda, kelompok dewasa (perempuan & laki-laki), kelompok ragam identitas di grass root, pemerintah daerah & pusat, media, akademisi, gerakan sosial, komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, regional & international agencies. Kerja bersama atau aksi kolektif menjadi strategi penting YKP dalam mempengaruhi aktor/stakeholder terkait untuk memberikan dukungan & perhatian pada pemenuhan HKSAR di Indonesia.



Fokus kerja YKP

1. ISU STRATEGI KEMASYARAKATAN



Penegakan hukum pemenuhan HKSR



Pencegahan perkawinan usia anak



Pendidikan atau penyadaran HKSR

2. ISU KELEMBAGAAN



Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pengembangan Tata Kelola Organisasi

Topik yang diusung YKP

- Implementasi layanan aborsi aman bagi perempuan hamil korban perkosaan sesuai undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009.
- Layanan Kespro dalam sekma Jaminan Kesehatan Nasional
- Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak
- Pendidikan Kespro & seksualitas yang komprehensif
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Aksi Kolektif, YKP melalui kerja pendampingannya berhasil mendorong kelompok dampingan menjadi agen perubahan dan terlibat secara bermakna dalam mengangkat dan menyebarkan isu seputar HKSR

2. Advokasi kebijakan,

- YKP berhasil mendorong keluarnya 3 Perbup dan 2 Perda terkait perlindungan perempuan dan anak termasuk pencegahan perkawinan anak.
- Terlibat bersama jaringan dalam mendorong beberapa kebijakan seperti:
 - (a). Perubahan usia minimum menikah bagi anak perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yang disahkan pada bulan Oktober 2019 menjadi Revisi Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019.
 - (b). Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) khususnya terkait upaya adanya layanan aborsi aman bagi korban perkosaan.
- Sejak disahkannya PP 61 tahun 2014 dan PMK NO 3 tahun 2016 terkait layanan aborsi bagi korban perkosaan YKP masih terus berupaya mengawal dan mendorong pemerintah agar layanan tersebut tersedia.

3. Lokal inisiatif, semakin menguatnya kepedulian publik pada isu HKSR dengan terlibatnya 503 orang dalam sejumlah penguatan kapasitas yang diinisiasi YKP. Forum-forum diskusi dan sosialisasi juga giat dibangun dengan melibatkan 13,775 orang

Dimana pengetahuan yang didapat bersama YKP menghasilkan beberapa inisiatif seperti:

- Diskusi dengan pemerintah desa Kauman dan Ciluk kabupaten Ponorogo yang berhasil dianggarkannya dana desa tahun 2020-2021 untuk pengadaan Pos Pelayanan Remaja yang dikelola oleh kelompok remaja YKP di 2 desa tersebut bekerjasama dengan bidan desa setempat.
- Kerja YKP dan kelompok di kabupaten berhasil mendorong pemerintah kabupaten Ponorogo dan Blitar dengan membentuk satgas penanganan perkawinan anak yang melibatkan mayoritas kelompok perempuan dampingan YKP

4. Kampanye Digital

Ditengah pembatasan sosial yang diberlakukan ada sebuah peluang yang dimanfaatkan hampir semua orang yaitu teknologi digital dimana bentuk pertemuan, pendidikan, berbagi informasi hingga belanja keperluan sehari-hari dilakukan secara online. Hal ini juga dimanfaatkan YKP dengan membangun saluran informasi menggunakan platform digital (media sosial) sebagai sarana pendidikan, penyadaran, kampanye dan advokasi.

Tujuannya adalah untuk terus memperkenalkan dan memantapkan isu HKSR yang diusung oleh YKP, salah satunya "Saatnya perempuan memutuskan" sebuah kampanye yang mengingatkan bahwa perempuan berhak memutuskan yang terbaik bagi dirinya termasuk kesehatan reproduksinya tanpa diskriminasi dan hal-hal yang mengancam seperti ketimpangan gender.

5. Publikasi

YKP selalu berupaya untuk berbagi pengetahuan kepada mitra dampingan dan masyarakat luas melalui berbagai media yang mudah diakses. Sejak tahu 2018 hingga 2021 YKP sudah menerbitkan 16 judul media cetak, 6 judul audio di kanal podcast dan 58 judul audio video yang dipublikasikan di kanal youtube. Publikasi informasi dan pengetahuan juga dimuat pada website dan media sosial. Penggunaan website dan media sosial YKP oleh masyarakat mulai diminati oleh masyarakat untuk mencari informasi khususnya terkait HKSR. Terbukti semenjak dimulai pengembangan kembali website YKP hingga tahun 2021 sudah dikunjungi 5,005 user dan dilihat sebanyak 7,541. Pada media sosial sudah terdapat 918 pengikut Instagram, 217 pengikut facebook page, 217 pengikut di Twitter dan 117 subscriber di kanal Youtube YKP, dan terus bertambah setiap harinya.

6. Berjejaring

Baik dari capaian dan tantangan ini menunjukkan YKP harus terus bergerak dan tumbuh memperkaya pengalamannya untuk menjadi sebuah organisasi yang kompeten dalam meintegrasikan pemenuhan HKSR dalam kerja-kerjanya

7. Tata kelola lembaga yang baik dengan upaya mengeluarkan sejumlah standar operasional prosedur (SOP) menjadi sebuah panduan yang membantu kerja YKP menjadi lebih baik dan aman



CAPA IAN



1. ISU STRATEGIS KEMASYARAKATAN

1.1. PENEGAKAN HUKUM atau PEMENUHAN KEBIJAKAN

Dalam isu strategis penegakan hukum atau pemenuhan kebijakan kegiatan YKP menyadari pada:

- 1.1.1. Kebijakan Layanan Aborsi Aman
- 1.1.2. Kebijakan Kespro dalam Skema JKN
- 1.1.3. Kebijakan Kespro Remaja

Dengan detail aktivitas:

1.1.1. KEBIJAKAN LAYANAN ABORSI AMAN-HKSR

Belum terimplementasinya PP 61 menunjukkan belum ada kebijakan yang dapat melindungi perempuan hamil korban perkosaan sehinggaterjadinya kriminalisasi bagi perempuan itu sendiri dan tenaga kesehatan, walaupun aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan, pada kenyataannya layanan aborsi aman masih sulit untuk diakses korban perkosaan, dikarenakan juga belum ada penunjukkan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan. Akibatnya, ancaman sanksi dan kriminalisasi membentang didepan mata, baik untuk korban perkosaan yang memutuskan menghentikan kehamilannya maupun dokter yang akan melakukan tindakan.

2019

- Diskusi “Bincang kesehatan perempuan dalam RUU-PKS & RKUHP” bersama anggota dewan (19 September 2019)
- Audiensi ke Komisi Yudisial (KY) untuk kasus W yang diperkosa kakaknya hingga hamil. W dan Ibu nya ditahan karena ada upaya aborsi. Pada audiensi YKP menyampaikan aturan sesuai UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan KY juga setuju jika ada dukungan YKP untuk memberikan penguatan kapasitas kepada hakim.
- Konsultasi Komnas Perempuan dan YKP terkait pasal-pasal Kespro (pemaksaan kontrasepsi & aborsi) dalam RUU PKS



- 2019**
- Menerbitkan buku desk review PP 61 tahun 2014, membedah PP 61 sebagai upaya dekriminalisasi memberi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, fasilitas pemberi layanan dan korban sebagai pengguna jasa, namun juga dari isi PP 61 ini juga menetapkan sejumlah syarat yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Kesehatan, peraturan setingkat Menteri atau dari instansi lain yang memiliki wewenang, misalnya peraturan Kapolri.
 - Pertemuan Jaringan Menyusun Strategi Bersama sebagai Upaya Pencegahan dan Pemenuhan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif, 8 November 2019
 - Sosialisasi PP 61 di kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan dukungan masyarakat termasuk instansi terkait untuk mendorong implementasi PP 61 dan melihat peran masyarakat untuk mengawasi PP yang dijalankan pemerintah (24-25 September 2019).
 - Diskusi bersama Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) (terkait layanan bagi korban perkosaan. LPSK dibentuk dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) dari diskusi disimpulkan LPSK belum dapat mengcover rujukan kasus kekerasan se-Indonesia. Diskusi bersama LPSK perlu ditindaklanjuti untuk mencari tau tantangan LPSK yg belum mampu menjangkau layanan bagi korban kekerasan apakah karena tupoksi yang tidak sesuai (2-5 September 2019)

- 2020**
- Audiensi Kemenkes yang menyatakan bahwa memang selama ini belum melakukan apa-apa dan akan segera mengimplementasikan PMK No.3 tahun 2016 dengan menerbitkan panduan awal penunjukan puskesmas dan rumah sakit.
 - *Kemenkes mengeluarkan draft NA Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan untuk pengecualian larangan aborsi
 - Pengumpulan data dan publikasi : How Far Rape Survivors Are Getting The Needed Services: Cases in Jakarta and Semarang
 - Mengirimkan surat kepada Kemenkes terkait layanan Kespro dalam situasi Pandemi COVID 19-telemedicine.
 - Diskusi “ Mengenal Kekerasan Seksual”
 - Diskusi “Sulitnya mendapatkan layanan aborsi aman bagi korban kekerasan” membahas terkait layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dengan narasumber dari BKKBN, Purn. Komjen Pol Suhardi Alius, dan Prof.Meiwita Budiharsana.
 - Diskusi “Hadirnya negara dalam penghapusan kekerasan kepada perempuan-sudahkah ada?” bersama dengan KPP&PA mendiskusikan tingginya kasus KTP di tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus dimana kita sedang menghadapi situasi pandemic yang menuntut kita untuk tetap diam dirumah namun justru kekerasan terus terjadi bahkan diruang privat.

- 2021**
- Kampanye “Saatnya Perempuan Memutuskan” terkait Kehamilan Yang Tidak Diinginkan/Direncanakan (KTD). Produksi video kampanye yang bertujuan mengupas bagaimana situasi perempuan sudah dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri khususnya pada saat perempuan mengalami KTD

Pada Teori Perubahan YKP salah satu target yang ingin dicapai yaitu tidak ada lagi kriminalisasi terhadap korban dan penyedia layanan aborsi aman, namun faktanya di setiap tahun terjadi kriminalisasi pada korban perkosaan yang membutuhkan layanan aborsi aman. Untuk itu YKP bersama jaringan mendorong layanan aborsi aman menjadi bagian dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada usulan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS) dimana saat ini Indonesia belum ada kebijakan yang secara holistik memberi perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan.

Tahun 2020-2021 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 25.234 kasus. Ketimpangan gender, minimnya pemahaman HKSR serta meningkatnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ditengarai menjadi faktor mengapa ditengah situasi pandemi Covid 19 justru kasus-kasus kekerasan meningkat dan terjadi tidak hanya di ruang-ruang publik tetapi juga terjadi di ruang privat dengan pelaku adalah orang dekat atau yang dikenal.

1.1.2.KEBIJAKAN KESPRO DALAM SKEMA JKN-BPJS

Beberapa peluang infrastruktur baik kebijakan sektoral tingkat nasional dan juga lokal telah tersedia namun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sebagai salah satu kebijakan kunci yang spesifik dan berpotensi mendukung terjaminnya HKSR perempuan Indonesia. JKN mulai diterapkan sejak awal 2014. Dalam konteks itu relatif diantisipasi bahwa tingkat pengetahuan elemen ekosistem, baik perempuan, pembuat kebijakan, tenaga Kesehatan, OMS dan media terkait HKSR dalam JKN relatif rendah.

Dengan data dari hasil survey, selama periode 2018-2021 YKP bersama jaringan yang terlibat dalam melakukan penelitian (Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan-JP2K) melakukan advokasi dan kampanye mendorong perbaikan layanan Kespro dalam skema JKN.

Untuk itu YKP yang telah menginisiasi kerja bersama (collective action) dengan nama Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) terus memadukan kerja-kerja advokasinya baik di daerah dan di nasional mulai dari Pengumpulan data terkait HKSR dalam skema JKN, baik di tataran pengetahuan perempuan, warga dan tenaga kesehatan, serta kepesertaan BPJS, akses layanan HKSR dan persepsi perempuan atas ketersediaan dan mutu layanan HKSR dalam JKN.

Berbasis data riset itu, anggota JP2K telah membangun kesadaran kritis, kapasitas kelompok komunitas dan perempuan agar mampu turut memantau kualitas pelayanan kesehatan HKSR. Catatan dan temuan itu selanjutnya disuarakan dan diadvokasi dalam forum strategis dan mekanisme pembuatan kebijakan baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi serta Nasional.

- 2019**
- Advokasi perbaikan layanan Kespro komprehensif dalam skema JKN
 - Sosialisasi survey yang dilakukan YKP & JP2K di 15 wilayah
 - Kampanye menolak kenaikan iuran BPJS dengan membuat petisi change.org

- 2020**
- YKP menjadi narasumber/rujukan terkait Kespro dalam JKN
 - Diskusi webinar terkait layanan kespro dan JKN
 - Kampanye Kespro dalam JKN

- 2021** Mengeluarkan buku (laporan survei) layanan Kespro dalam skema JKN

CERITA PERUBAHAN

SPEK-HAM (anggota JP2K-Jawa Tengah) telah memfasilitasi penyadaran kritis perempuan dan warga di beberapa desa terkait HKSR dalam JKN. Hal ini juga melahirkan kesadaran bahwa Dana Desa perlu dialokasikan untuk mendukung pemenuhan hak ini. Desa Blumbang Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali telah mencatat peningkatan alokasi dana kesehatan (umum) bersumber Dana Desa mulai dari 15 juta (2019), 23 juta (2020) dan diajukan 30 juta (2021) (dokumen kebijakan terlampir). Sementara kebanyakan desa di sana umumnya baru mengalokasikan sekitar 5 juta untuk kesehatan.

LP2M (anggota JP2K-Sumatra Barat) telah memfasilitasi lahirnya SK Camat no.07b/KEP/C.E.L/IV-2019 tentang Penetapan Tim Layanan pada Pusat Layanan dan Pembelajaran Hak Kesehatan Reproduksi (HKSR) – Gizi bagi perempuan di Kecamatan Enam Lingsung. (dokumen kebijakan terlampir). Pusat ini didukung Nagari dan Kecamatan serta dikelola oleh kader terlatih dari lima Nagari. Mereka berbagi tugas dalam tiga Tim Layanan, yaitu Tim Layanan Konseling, Edukasi, dan Advokasi. Mereka mendidik perempuan dan warga terkait HKSR, JKN serta menjadi wadah penerima pengaduan warga terkait HKSR dalam JKN. Para kader mencatat kasus pengaduan (kualitatif). Pusat Layanan dan Pembelajaran ini berencana meningkatkan kapasitas pendataan kuantitatifnya dalam waktu mendatang. Jelang penutup kemitraan ini, LP2M bersama Pusat Layanan dan Pembelajaran sedang mendorong wacana kebijakan terkait wadah tindak lanjut pengaduan lintas sektor dan lintas pihak antara lain BPJS, Dinas Sosial, PPA dan Dinas Kesehatan.

1.1.2. KEBIJAKAN KESPRO REMAJA

Kebijakan terkait Kespro remaja yang dimandatkan dalam UU Kesehatan No 36 tahun 2009 mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial dan ekonomi. Hal ini diwujudkan pemerintah dengan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dimana implementasinya masih ditemukan beberapa catatan. Dari survey PKPR yang dilakukan YKP tahun 2018 dimana belum ada standar/panduan khusus akan layanan PKPR sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada remaja (seperti ramah remaja, jam layanan yang buka saat jam sekolah). Program pemerintah terkait Kespro remaja selain PKPR jada Posyandu Remaja dan Program Desa Peduli Perempuan dan Anak dimana memberikan peluang untuk keterlibatan masyarakat khususnya di tingkat Daerah: Kabupaten dan Desa.

YKP bersama kelompok dampingannya menindaklanjuti upaya advokasi ini baik ditingkat nasional dan daerah:

- Mendorong pendidikan Kespro untuk mengatasi/mencegah perkawinan anak dan hal lain yang mengancam remaja seperti KTD, perkawinan anak, stunting, IMS, dsb
- Mendorong pemerintah untuk merumuskan jalan keluar atas persoalan Kespro remaja seperti KTD yang berdampak pada hilangnya hak anak seperti pendidikan
- Advokasi di tingkat desa menggunakan anggaran dana desa untuk pos pelayanan kesehatan remaja di Desa Kauman & Desa Ciluk.

2019

- Orang muda melakukan dialog ke 2 Pemerintah Desa, yaitu Kauman dan Ciluk terkait pembetukan Pos Pelayanan Remaja di tingkat desa dan usulan ini disetujui dengan menggunakan dana desa tahun 2020 dan 2021
- Diskusi Kespro Remaja-PKPR bersama Bappenas, Kemenkes dan BPJS.

2020

- Terbentuknya pos pelayanan remaja di desa Ciluk, bekerjasama dengan bidan desa orang muda kelompok dampingan YKP menyediakan informasi dan pemeriksaan kesehatan bagi remaja/orang muda setempat
- Melakukan diskusi FGD Kespro remaja dalam skema JKN bersama Kemenkes & BPJS
- Diskusi di kabupaten Ponorogo oleh klp dampingan YKP terkait Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan Kondisi Perempuan di masa Pandemi. Pada diskusi ini terlibat langsung Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang P3A Dinas Sosial, Ketua Unit Pelayanan dan Pendampingan Kabupaten Ponorogo, dan Kepala Puskesmas
- Mengadakan pelatihan tentang kesadaran kritis dengan metode Participatory Action Research (PAR) terkait kontrasepsi dan perencanaan kehamilan kepada Key Influencer kelompok remaja.
- Mengadakan pelatihan tentang kesadaran kritis dengan metode Participatory Action Research (PAR) terkait kontrasepsi dan perencanaan kehamilan kepada Key Influencer kelompok perempuan dewasa
- Mengadakan pelatihan komunikasi interpersonal dan teknik dasar konseling kepada key influencer remaja atau teman sebaya.

2021

- Membuat platform media kampanye

CERITA PERUBAHAN

POS PELAYANAN REMAJA DESA CILUK-KAB PONOROGO



Kepala Desa Ciluk, Bapak Ridwan, mulai memahami terkait pentingnya pemenuhan informasi dan layanan terkait HKSR terutama bagi remaja di desanya. Beliau terinspirasi dari kegiatan sosialisasi HKSR pada tanggal 27 November 2020 yang diinisiasi kelompok remaja dampingan YKP yang menamakan dirinya Generasi Peduli Kesehatan (SIPETA). Pada kegiatan tersebut Bapak Ridwan melihat bahwa remaja penting untuk diberikan kesempatan dan ruang dalam mengupayakan kesehatan remaja yang lebih baik. Kasus perkawinan anak dan KTD pernah terjadi di desa Ciluk sehingga apa yang dilakukan SIPETA penting untuk dilanjutkan, beliau menyadari penting untuk tersedianya layanan remaja bagi remaja desa Ciluk agar terhindar dari persoalan Kespro. Selain kegiatan sosialisasi SIPETA juga menindaklanjuti dengan membangun dialog bersama Bapak Ridwan dan jajaran beliau dimana memberikan kesadaran bahwa dapat memanfaatkan dana desa dan menghasilkan pemerintah desa Ciluk menyetujui untuk memasukkan rencana “pembentukan pos pelayanan remaja” pada anggaran dana desa tahun 2021. Pos pelayanan ini pun berjalan di tahun 2021 menggunakan dana desa dan bekerjasama dengan bidan desa setempat.

1.2. PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pada tahun 2019 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 telah direvisi menjadi UU Perkawinan No 16 tahun 2019, dimana usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sama seperti usia minimum menikah bagi laki-laki. Namun nampaknya revisi undang-undang ini belum mampu membendung tingginya angka perkawinan anak, pasalnya angka permohonan dispensasi kawin semakin melonjak, yang sebagian besar permohonan kawin masih dikabulkan oleh hakim pengadilan agama. Menurut data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, pada Januari – Juni 2020 menerima permohonan dispensasi kawin 34,000 kasus. Angka ini meningkat 70% dibandingkan angka permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2019 sebanyak 23,700 kasus.

Selain kebijakan di tingkat nasional, kabupaten pun telah mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak dengan mengeluarkan Peraturan Bupati di 3 kabupaten (Ponorogo, Bojonegoro dan Blitar) serta di tahun 2020 dikeluarkan Perda di 2 kabupaten Ponoorgo dan Blitar. Kelompok dampingan juga bergerak untuk terlibat dalam musrembang baik kabupaten dan desa mengusulakn program pencegahan perkawinan anak dan penggunaan dana desa.

Ditahun 2020 YKP melakukan evaluasi atas program pencegahan KTPAP & PA di 3 kabupaten wilayah intervensi YKP, tujuannya untuk mengukur apakah rancangan kegiatan sudah tepat dan dapat memberikan masukan untuk rencana kerja berikutnya pada isu KTPAP & PA. Sejumlah intervensi pencegahan perkawinan anak baik yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti yang dilakukan YKP di 3 kabupaten di Jawa Timur (angka perkawinan anak 2017-27,09% dan 2019- 11,1%) maupaun pemerintah untuk mencapai target RPJMN 2020 (8.74%), SDGs pada tahun 2030 (6.94%) tetap perlu terus mengupayakan penyadaran di masyarakat, dalam koordinasi YKP dengan KUA kab Bojonegoro dimana masih ditemui kasus perkawinan anak yang tidak dicatatkan dan juga bagaimana mencari jalan keluar bagi anak perempuan yang terpaksa menikah karena kehamilan tidak diinginkan/direncanakan (KTD) baik dari indikasi kesehatan dan tercabutnya beberapa hak seperti pendidikan.

2019 MK menyetujui permohonan JR UU Perkawinan dengan putusan usia bisa disamakan dengan usia laki-laki (19 tahun) atau menjadi 18 tahun.

September 2019, UU Perkawinan disahkan DPR/MPR dengan usia minimum menikah bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun.

- Perbup Pencegahan Perkawinan Anak/Pendewasaan Usia Menikah di 3 Kabupaten
- Penguatan kapasitas kpd KLP untuk membangun posko pengaduan terkait KTPAP & PA. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam menghadapi kasus KTPAP dan PA di daerahnya.
- Diskusi keberhasilan revisi UU Perkawinan
- Diskusi bersama Bappenas terkait Stunting Sebagai Dampak Dari Perkawinan Anak
- Pelatihan Keterlibatan Laki-laki dalam Pencegahan KTPAP dan PA di Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo dan Kab. Blitar
- Pelatihan Advokasi Untuk Perempuan Dewasa Dan Remaja Perempuan Dalam Pemenuhan Hak Untuk Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Perempuan Dan Perkawinan Anak
- Diskusi bersama Hakim Agama dan Pemerintah terkait pencegahan perkawinan anak di tiga kabupaten (November-Desember 2019)
- Pertemuan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo Dan Kab. Blitar Untuk Memperkuat Dukungan Pada Isu KTPAP dan PA
- Pertemuan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo Dan Kab. Blitar Untuk Memperkuat Dukungan Pada Isu KTPAP dan PA

- 2020**
- Perda Perkawinan Anak di 2 kabupaten
 - Kampanye isu KPAAP & PA: WFH, Medsos, Lomba
 - Pelatihan Kampanye “Membangun Opini Menggalang Dukungan”
 - Kerja-kerja kelompok Dampingan

- 2021**
- Pelatihan Kampanye Digital terkait KTPAP & PA kepada orang muda di kab Ponorogo, Bojonegoro & Blitar.
 - Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin
 - Launching buku saku bagi hakim

CERITA PERUBAHAN PERKAWINAN ANAK

Irnanidini Putri, siswi kelas 12 di SMAN, Ponorogo, bergabung menjadi penggiat CS-YKP sejak masih duduk di kelas 8 di SMPN. Pengalaman masa kecilnya di desa sangat berbeda dengan kehidupan di kota Ponorogo, di mana pergaulan anak laki-laki dan anak perempuan masih sangat dibatasi, dilarang bermain bersama-sama, apalagi kalau mandi di sungai bersama-sama anak laki-laki nanti anak perempuan bias hamil. Pernah ketika Irna masih di kelas 6, ketika mengalami menstruasi pertama, karena masih belum akrab dengan isu HKSR, tidak pernah dibahas dalam keluarga dan di bangku sekolah hanya sebatas pelajaran biologi yang tidak aplikatif. Pagi harinya, Irna masih dengan penuh percaya diri sempat sholat di masjid, tidak menyadari bahwa sudah ada bercak darah.



Pada siang harinya ketika darah yang keluar semakin banyak, Irna sangat bingung dan merasa dirinya kotor dan najis. Ketika pindah ke kota untuk melanjutkan studi di SMPN, Irna tercengang bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki dapat bermain bersama, sama sekali tidak ada kekawatiran akan hamil – perilaku yang sama sekali tidak diperkenankan di desanya.

Kemudian diajak ikut pelatihan CS-YKP, dan mengikuti pre-test banyak pertanyaan yang tak dapat dijawab, dan ketika sampai pada pertanyaan tentang organ seks, tambah bingung. Setelah mengikuti pelatihan CS-YKP, berbekal buku pink, dengan bangga diperlihatkan dengan teman-teman sekolah, modul ini ditanggapi sebagai pornografi dan dicoret-coret serta dilempar-lempar. Namun ada teman perempuan lain yang tertarik dengan buku pink, ternyata dia pernah dilecehkan. Namun saking PD nya membuat tafsir sendiri atas buku pink, seperti garis di bawah pusat sebagai tanda kehamilan, ternyata keliru dan setelah searching di Google, ternyata ada pembahasan di Kompas.com, ternyata garis itu adalah tanda perubahan hormonal.

Ketika bertanya kepada tetangga mengapa teman sebayanya dinikahkan, langsung dibungkam – jangan cerewet. Padahal desa Irna merupakan salah satu desa dengan perkawinan anak tertinggi se Ponorogo. Penyebab pernikahan anak di Ponorogo, 1) sudah terlanjur hamil; 2) alasan ekonomi; 3) anak perempuan itu sendiri yang ingin menikah. Dari pengalaman Irna tingkat perceraian pernikahan anak cukup tinggi, sebagai contributor JAMUR (janda di bawah umur).

Pembentukan forum anak, ternyata adalah forum yang nyaman untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman antar kelompok sebaya. Kemudian dibentuk kelompok yang melakukan sosialisasi tentang HKSR, perkawinan anak, maupun KtP-AP. Ternyata gayung bersambut dan mulai lah dapat digulirkan program RP3A untuk membendung kebiasaan pernikahan anak.

Sosialisasi di sekolah tidak mudah dan cenderung menimbulkan perdebatan dengan ROHIS, khususnya dalam kaitan berbusana terbuka dianggap sebagai undangan bagi laki-laki untuk berlaku nakal. Namun akhirnya dialog menghasilkan pemahaman baru. Pembahasan antar kelompok sebaya di sekolah cenderung bisik-bisik, karena takut dicurigai sedang bergunjing pornografi.

RP3A telah mengembangkan dialog desa dalam rangka mengadvokasikan PERDES untuk mencegah perkawinan anak. Di samping memanfaatkan media sosial untuk kampanye milenial. Sementara itu Satgas RP3A masih sibuk mengurus pengaduan, belum sempat menjalankan fungsi advokasi. Sementara itu LAZIS MU dan LAZIS NU, di samping donasi pribadi aktif menyantuni kurban.

Saat ini Irna menjadi koordinator kelompok anak muda dampingan YKP di Blitar Jawa Timur dan aktif melakukan sosialisasi kepada teman sebaya terkait pengetahuan yang di dapatkan Irna selama mengikuti program CS YKP. Meskipun banyak sekali kesulitan yang ditemui seperti anggapan anak kecil sok tahu. Namun hal tersebut tidak membuat Irna menyerah. Malah membuat Irna semakin berani dan kebal dengan ejekan orang.

CERITA PERUBAHAN KEKARASAN TERHADAP PEREMPUAN & PERKAWINAN ANAK (KTP)

Beberapa cerita dari upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan YKP khususnya di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur selain menghasilkan sejumlah inisiatif lokal juga MAMPU menciptakan aktor/agen perubahan yang bekerja untuk mengatasi KTPAP & PA mulai dari pemerintah, kelompok remaja, kelompok perempuan, kelompok laki-laki hingga penyidik di kepolisian yang mampu meningkatkan kualitas penyidikannya khususnya pada kasus KTP, seperti yang terjadi di kab Ponorogo dimana penyidik yang sedang menangani kasus KTP dan berkonsultasi dengan YKP yang akhirnya penyidik tidak jadi menerbitkan surat penahanan bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini menunjukkan sudah mulai ada kesadaran pihak penyidik dalam menangani kasus KTP dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak korban.

1.3. PENDIDIKAN ATAU PENYADARAN TENTANG HKSR

YKP secara intensif melakukan penyadaran kepada publik dan stakeholder lainnya agar kepedulian publik terhadap pentingnya HKSR dan dukungan stakeholder juga menguat. Pendidikan penyadaran juga dijalankan kepada publik, termasuk perempuan dan remaja juga untuk mengupayakan perubahan perilaku hidup sehat dan sadar akan haknya.

Selama periode 2018-2021 pendidikan HKSR yang dilakukan YKP memang mengalami perluasan dimana sejak tahun 2020-2021 dengan situasi Pandemi COVID 19 yang memaksa terjadi perubahan metode pemberian informasi dari yang semula lebih banyak dilakukan secara tatap muka (offline) terpaksa dilakukan secara daring (online) dengan pertimbangan keamanan juga upaya menekan penyebaran virus COVID 19.

Pergeseran ini juga dikarenakan minat remaja yang cukup besar dalam memanfaatkan media digital sebagai salah satu rujukan sumber informasi remaja mencari pengetahuan/informasi Kespro. YKP melihat ini sebagai sebuah peluang dimana minat remaja yang besar akan penggunaan media digital termasuk media sosial dapat digunakan sebagai metode untuk memasukkan isu HKSR. Untuk itu di tahun 2020 dan 2021 YKP melakukan pelatihan kampanye digital terkait HKSR.

- 2019**
- Pemberian informasi kepada jurnalis
 - Lomba artikel HKSR oleh jurnalis
 - Pelatihan Kespro dalam pencegahan perkawinan anak di 3 kabupaten (Ponorogo, Bojonegoro & Blitar), Sekolah Bidan,
 - Pelatihan Kespro dalam mencegah stunting
 - Terlibat dalam konferensi Kependudukan ICPD di Nairobi

- 2020**
- Pendidikan Kespro kepada sekolah Bidan, pemuka agama perempuan (klp dampingan Mubadalah & KUPI)
 - Penyadaran melalui media film “ Saatnya Perempuan Memutuskan terkait KTD”
 - Pendidikan Kespro kepada tenaga pendidik di 3 kabupaten (Ponorogo, Bojonegoro & Blitar)

- 2021**
- Pendidikan HKSR bagi mitra program creating spaces OXFAM -kelompok pendamping
 - Bimbingan teknis

CERITA PERUBAHAN PENDIDIKAN HKSR

Mengenal Ahmad Fahrizal Aziz,
Pegiat Kespro dan Koordinator KLP2A Blitar

Semangat Meski dapat Olokan saat Menedukasi Masyarakat

Olokan kerap diterima Ahmad Fahrizal Aziz. Utamanya, saat memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi (kespro) kepada masyarakat. Padahal pemahaman mengenai kespro penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

FIMA PURWANTI, *Kademangan, Radar Blitar*



MENJADI pegiat kespro bukan hal mudah. Terlebih bagi seorang pria. Sebab, kespro masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bagi sebagian orang.

Seperti dilakoni Ahmad Fahrizal Aziz. Dia salah seorang pegiat kespro di Bumi Penataran. Memberikan pemahaman mengenai kespro kepada masyarakat adalah tugas utamanya. Hampir semua kalangan menjadi sasaran. Termasuk para pria berbagai usia.

Fahrizal mengaku mulai getol menjadi seorang pegiat kespro sejak tiga tahun terakhir ■

Baca Semangat... Hal 17

ENERGIK: Ahmad Fahrizal Aziz salah seorang pegiat kesehatan reproduksi (kespro).

CERITA PERUBAHAN PENDIDIKAN HKSR

Semangat Meski dapat Olokan saat Mengedukasi Masyarakat

Sambungan dari Hal 15

Tepatnya setelah menjadi peserta sosialisasi mengenai kespro. Tak sengaja memang, tetapi ilmu yang didapatkan tetap bermanfaat sampai sekarang.

“Awalnya *ya* cuma peserta biasa yang *nggak* sengaja ikut sosialisasi kespro pada 2019,” ujarnya.

“Merasa risih saat awal, kenapa harus belajar kespro. Ternyata setelah mendalami dan paham betul, jadi tahu apa penting dan fungsinya kespro itu,” imbuhnya.

Dia mengatakan belajar kespro tidak hanya mengetahui tentang alat reproduksi yang dimiliki setiap orang. Selain itu, tidak hanya terbatas pada bagian atau anatomi alat kelamin. Namun, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem reproduksi. Utamanya, terkait masing-masing bagian beserta fungsi dari sistem reproduksi.

“Ilmu-ilmu tentang kespro kami alami, kemudian kami tanamkan ke diri sendiri. Setelah itu bagaimana kami sampaikan ke masyarakat. Termasuk juga penyebaran informa-

si mengenai hak kesehatan seksual reproduksi alias HKSR,” ujar pria berusia 29 tahun itu.

Fahrizal mengakui tak mudah menjadi seorang pegiat kespro. Sebab, kerap mendapatkan olokan alias cemoohan saat mengedukasi warga. Itu sudah wajar, karena kespro masih dianggap tabu atau tak patut dibicarakan di ruang umum.

“Mereka (masyarakat, Red) masih beranggapan kalau kespro itu tabu. Masih enggak etis kalau dibicarakan di ruang umum. Jadi memang harus hati-hati dalam penyampaiannya,” lanjutnya.

Olokan pun masih sering diterima oleh warga asli lingkungan Jatisari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar itu. Semua olokan itu ditepis dengan timpaan jawaban yang santai, namun tetap mengedukasi. Pasalnya, masyarakat akan lebih mudah memahami materi jika disampaikan secara perlahan dan santai.

Fahrizal tak hanya bergelut dibidang kespro saja. Namun, dia juga fokus menjadi salah seorang koordinator komunitas laki - laki peduli perempuan dan anak (KLP2A). Komunitas

itu turut menjadi wadah utamanya dalam memberikan ruang belajar bagi para lelaki. Utamanya dalam mendapatkan edukasi terhadap perempuan dan anak.

“Tak heran kalau mayoritas pelaku kekerasan atau kejahatan pada perempuan dan anak adalah laki-laki. Dari situlah kami buat komunitas agar para lelaki ini tahu, sekaligus memahami tentang hak perempuan dan anak,” lanjutnya.

Lelaki berkacamata itu melanjutkan, paham mengenai kespro hingga kepedulian terhadap perempuan dan anak sudah menjadi kewajiban bagi semua kalangan. Terlebih bagi seorang lelaki. Sebab, keduanya dapat menjadi dasar pemahaman untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Fahrizal yakin belum semua lelaki paham kespro, maupun kepedulian pada perempuan dan anak. Namun dia juga yakin, para pria mau belajar memahami tentang kedua hal itu. “Karena dua hal itu bisa mencegah dan menekan angka kekerasan seksual yang selama ini masih sering terjadi,” tandasnya. (*/**c1/wen**)

2. ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN

Kelembagaan bertujuan agar membangun dan mengelola berfungsinya sebuah sistem dan panduan yang dibutuhkan agar organisasi mampu menyediakan dan menjalankan sistem tersebut dengan sumber daya yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya visi dan misi organisasi untuk keberlanjutan organisasi.

2.1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM, upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. YKP memberikan kesempatan kepada pengurus dan staf mengikuti penguatan kapasitas (pelatihan, konferensi, diskusi) untuk dapat membantu kerja-kerja personil lebih berkualitas
2. Menciptakan budaya kerja yang baik, aman, saling mendukung/saling belajar dan saling menghargai diantara personil
3. Adanya ruang partisipasif bagi personil dalam menyusun panduan yang dibutuhkan organisasi
4. Peran dan tugas yang jelas, sehingga personil yang terlibat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sehingga kerja personil menjadi efektif dan efisien.

2.2. PENGEMBANGAN TATA KEPENGURUSAN (GOVERNANCE) & STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mengembangkan pengelolaan dan tata kepengurusan dibutuhkan panduan mudah diterapkan semua pihak yang terlibat dalam kerja YKP. Untuk itu selama periode 3 tahun, panduan yang telah dikeluarkan YKP:

1. SOP MEAL - Monitoring, Evaluation, Accountable and Learning

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan pengembangan di lingkup internal manajemen, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu program merupakan keharusan karena penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas

2. SOP Safe Guarding

Kebijakan atau prosedur ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada seluruh pihak tentang bagaimana mereka harus terlibat dengan anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan ketika bekerja untuk, atas nama, atau dalam kemitraan dengan organisasi. Hal ini juga untuk membantu organisasi untuk memastikan bahwa seluruh karyawan, relawan, dan perwakilan lainnya dilindungi. Ini dimaksudkan untuk membantu kita memiliki pemahaman yang sama tentang pengamanan dan penyelesaian masalah, mengembangkan praktik baik di berbagai area dan beragam tempat pelaksanaan program organisasi dan dengan demikian akan meningkatkan akuntabilitas dalam aspek penting dari

3. Draft SOP Kelembagaan

Untuk mendukung gerak organisasi yang dinamis, sumberdaya organisasi (SDM, Informasi, keahlian, peralatan dan teknologi serta modalitas sosial lainnya).

2.3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN & PEMBELAJARAN

Tahapan yang dipersiapkan untuk YKP menjadi pusta informasi terkait HKSR dengan memulai:

1. Identifikasi apa saja informasi yang tersedia di YKP
2. Mengumpulkan catatan bagaimana YKP ingin informasi tersebut disajikan
3. Apa kebutuhan organisasi dalam mempersiapkan sebuah sistem informasi
4. Penguatan kapasitas personil yang bertanggungjawab pada pengelolaan sistem informasi
5. Membangun media informasi online dan offline. Secara online YKP mendevlop informasi melalui media sosial disituasi saat ini banyak digunakan atau diakses oleh masyarakat. Media sosial YKP selain dimanfaatkan memberikan informasi, menggalang opini sekaligus sebagai media yang mengcounter atau meluruskan pemberitaan yang keliru terkait HKSR.

2.4. MEMPERKUAT & MEMPERLUAS KERJA BERJEJARING

YKP juga terus berupaya memperkuat jejaring CSO agar aktif berinteraksi dengan penentu kebijakan dan sebagai kekuatan kolektif menyuarkan pemenuhan HKSR.

Hingga saat ini, YKP masih aktif untuk membangun/memperluas dan mempertahankan jaringan. Hal ini ditunjukkan dengan pelibatan jaringan dalam kegiatan-kegiatan YKP. Sebagai timbal balik, YKP juga aktif untuk menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh jaringan. Beberapa jaringan yang membina hubungan baik dengan YKP yakni organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, lembaga donor, UN Agencies, serta individu yang memberikan perhatian kepada isu-isu perempuan (termasuk juga anak dan remaja perempuan), kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), dan HAM. Beberapa kegiatan yang dilakukan YKP untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja, yakni:

1. Pertemuan di tingkat nasional
2. Pertemuan di daerah lokal.
3. Aktif hadir pada pertemuan-pertemuan jaringan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, LSM, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga donor
4. Ikut terlibat dalam kegiatan bersama LSM tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil Evaluasi Program

"Menciptakan Ruang Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & Perkawinan Anak" di Kabupaten Ponorogo, Bojonegoro & Blitar

Pendahuluan

Perkawinan anak salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Anak yang dikawinkan pada usia di bawah 19 tahun memiliki kerentanan mengalami kekerasan dan keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan termasuk kebutuhan dasar sehingga berpotensi menjerumuskan lebih dalam pada kemiskinan.



Sebagai bentuk inisiatif dan kontribusi menghapus perkawinan anak maka Yayasan Kesehatan Perempuan bersama OXFAM Indonesia melalui program MENCiptakan RUANG AKSI (periode 2016-2019) dengan bermitra bersama pemerintah daerah dan masyarakat dari tiga kabupaten: Kabupaten Ponorogo, Blitar & Bojonegoro. Program ini bekerja pada tiga pilar:

- Pilar 1 (Pencegahan): Menciptakan ruang dimana kunci pemangku kepentingan masyarakat dapat mengidentifikasi, bertanggung jawab dan memelihara kesamaan sikap gender dan norma positif
- Pilar 2 (Respon): Menciptakan ruang untuk perempuan dan remaja perempuan yang selamat untuk mengakses ruang yang aman dalam hubungannya untuk mendukung layanan dan memperkuat kesempatan ekonomi.
- Pilar 3 (Keberlanjutan) Menciptakan ruang untuk CSO, khususnya pada Organisasi berbasis pemenuhan hak perempuan, institusi lain dan jaringan untuk terhubung, merefleksi, berbagi, belajar dan mengadaptasikan pendekatan mereka untuk mengurangi KTPAP & PA, berdasarkan pengetahuan dan inovasi baru, termasuk mobilisasi.

Program ini berhasil melahirkan sejumlah champion yang terlibat aktif dalam penghapusan KTPAP & PA dengan melibatkan kelompok remaja, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki.

1. Relevansi Isu KTPAP & PA di Masyarakat

37% Responden yakin bahwa Isu KTPAP & PA menghambat pemenuhan hak dan kesejahteraan anak dan perempuan

68% mempersepsi bahwa **perkawinan anak berdampak buruk pada anak perempuan**

30% menyatakan tidak peduli dengan isu KTPAP & PA

Hal ini membuktikan bahwa isu KTPAP & PA merupakan persoalan yang relevan atau nyata yang ditemui di 3 kabupaten wilayah dampingan YKP.

Hal ini merupakan agenda penting untuk selanjutnya agar semua pihak terus mensosialisasikan atau memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam pencegahan KTPAP & PA.



2. Darimana Mengetahui Isu KTPAP & PA

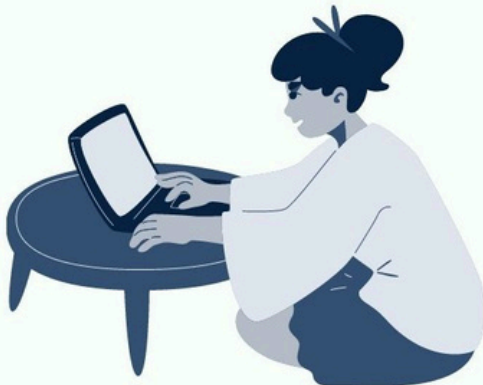


Media sosial (75%) merupakan model informasi yang paling mudah di akses dan efektif karena dapat dilakukan secara mandiri dan online, sedangkan keterlibatan relawan KTPAP & PA, Majelis Taklim, Posyandu sebenarnya menghasilkan agen perubahan yang cukup aktif namun mengalami keterbatasan dalam menjangkau, memerlukan kesiapan waktu dan dukungan lainnya.

3. Alasan Menjadi Agen Perubahan Pada Isu KTPAP & PA

Sebanyak **69%** alasan responden menjadi agen perubahan pada isu KTPAP & PA dikarenakan masalah pernikahan anak belum menjadi perhatian publik dan disusul karena isu kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang gawat sebesar **35%**.





4. Informasi Yang Paling Memberikan Perubahan Bermakna Bagi Para Agen Perubahan

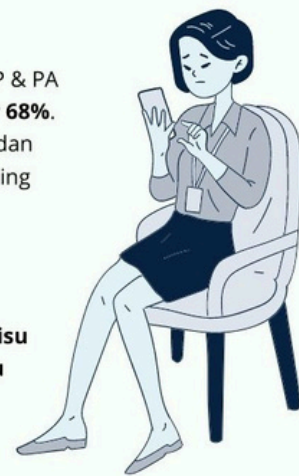
Penguatan agen perubahan oleh YKP paling bermakna dalam hal dampak perkawinan anak pada status kesehatan reproduksi anak (72%), disusul dengan peran anak muda (62%), sedangkan dalam materi menyusun rencana advokasi hanya 42% dan mekanisme layanan KtP-AP & PA hanya 48%.

5. Kendala Dalam Mensosialisasikan Isu KTPAP & PA

Kendala atau kesulitan yang terbesar dalam mensosialisasikan isu KTPAP & PA datang dari **ketidak-pedulian masyarakat akan isu ini, yakni sebesar 68%**. Kendala terbesar berikutnya yaitu lemahnya dukungan lembaga agama dan lemahnya dukungan aparat sipil negara dari SKPD terkait, masing-masing sebesar **27%**

6. Isu KTPAP & PA Yang Paling Sulit Disosialisasikan

Isu yang paling sulit untuk disosialisasikan para agen perubahan adalah **isu gender dan seksualitas (40%)**, disusul **isu perkawinan anak (38%)**, **isu KTPAP & PA bukan prioritas (33%)**, sedangkan **isu kespro sulit untuk dipersepsikan oleh 14%** agen perubahan.

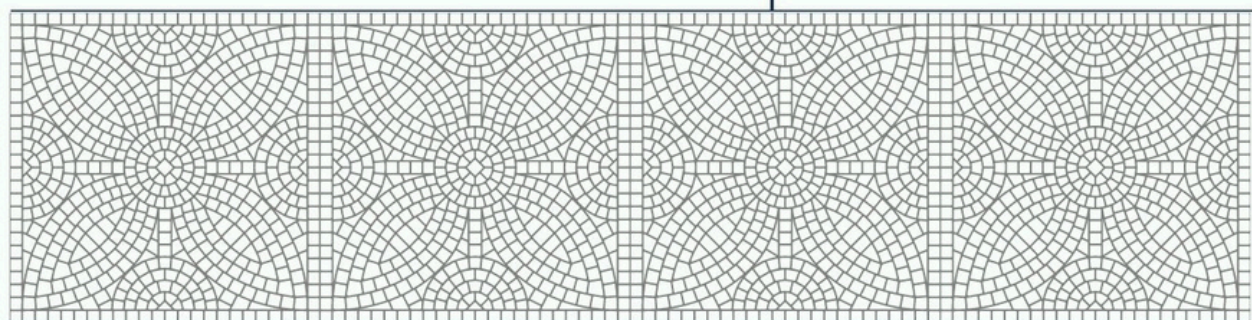


Rekomendasi

- Program CS-YKP telah berhasil mendorong penerbitan Peraturan Bupati tentang KtP- AP & Perkawinan Anak di 3 kabupaten: Bojonegoro, Ponorogo, dan Blitar, sebelum diterbitkannya UU No.16 tahun 2019 tentang Revisi UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Perma No.5. tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan anak.
- Penguatan kapasitas bagi agen perubahan memberikan kelompok kekuatan untuk terlibat secara partisipatif dalam isu yang diusung.
- Pentingnya pelibatan multipihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, orang muda, tokoh agama/tokoh masyarakat, media, dll dalam pencegahan KTPAP&PA untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Manfaat Evaluasi

Evaluasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan kunci mulai sejak pengembangan rancangan evaluasi. Semua temuan penting dikomunikasikan langsung agar dapat menjadi masukan berharga dalam merancang program selanjutnya, khususnya dalam memperkuat tim kabupaten untuk menjaga momentum gerakan penciptaan ruang aksi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.



Sekretariat: Jl. Kaca Jendela II No. 9, Rawajati Kalibata, Jakarta Selatan 12750 - Phone +62 21 790 2112 - Fax +62 21 790 2102 - Email office@ykp.or.id

MEREVITALISASI & MEMPERKUAT GERAKAN PEREMPUAN-JP2K UNTUK ADVOKASI PERBAIKAN KEBIJAKAN UNTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEREMPUAN

Mengkaji sejauh mana program YKP selaras dengan konteks dan berpotensi efektif menyelesaikan masalah HKSR perempuan di tataran nasional maupun lokal.

Ragam sumber data baik Indeks Kemiskinan dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan masih tingginya dan betapa rumitnya isu HKSR perempuan di Indonesia. Tingkat kemiskinan dan data terkait angka kematian ibu (AKI), reproduksi remaja, kontrasepsi, infeksi menular seksual (IMS), HIV, kanker organ perempuan, perkawinan anak serta kekerasan termasuk seksual terhadap perempuan ditengarai tinggi. **Beberapa peluang infrastruktur baik kebijakan sektoral tingkat nasional dan juga lokal telah tersedia namun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sebagai salah satu kebijakan kunci yang spesifik dan berpotensi mendukung terjaminnya HKSR perempuan Indonesia.** JKN mulai diterapkan sejak awal 2014. Dalam konteks itu relatif diantisipasi bahwa tingkat pengetahuan elemen ekosistem, baik perempuan, pembuat kebijakan, tenaga Kesehatan, OMS dan pers terkait HKSR dalam JKN relatif rendah. Selain itu, meski tercatat banyak OMS peduli isu perempuan dan kesehatan, ditengarai mereka relatif belum menguasai hal spesifik, seperti HKSR dan juga belum memadukan kerja terkait dalam aksi bersama.

Berkeyakinan kerja advokasi perlu didukung data dan bukti, YKP mengelola riset dalam modal berjejaring bersama anggota JP2K di 15 provinsi secara berseri (tiga tahun). Riset diarahkan pada pengumpulan data terkait HKSR dalam skema JKN, baik di tataran pengetahuan perempuan, warga dan tenaga kesehatan, serta kepesertaan BPJS, akses layanan HKSR dan persepsi perempuan atas ketersediaan dan mutu layanan HKSR dalam JKN.

Advokasi HKSR merupakan isu yang sangat strategis bagi perempuan setidaknya karena beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkoreksi dan memperbaiki peruntukan BPJS tepat sasaran bagi yang berhak mendapatkannya.
- Meningkatkan kepedulian perempuan dan masyarakat umumnya untuk mengupayakan layanan HKSR yang berkualitas bagi perempuan.
- Menumbuhkan inisiatif-inisiatif dan tindakan-tindakan kolektif secara nyata perempuan dan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya terkait pelayanan HKSR yang berkualitas.
- Memperkuat jejaring OMS khususnya JP2K sebagai watch dog dan jejaring advokasi terkait HKSR.
- Mendorong keterbukaan dan dialog kritis antara pemerintah, OMS, dan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk memperbaiki kebijakan agar layanan BPJS dapat memenuhi HKSR bagi kaum perempuan.
- Pintu masuk agar ada perhatian, kesadaran dan dialog dengan berbagai pihak terkait isu-isu yang masih relatif sensitif seperti aborsi aman dan pencegahan perkawinan anak sebagai persoalan HKSR yang juga perlu dipecahkan bersama.

Outcome 1

JP2K menjadi jaringan solid untuk melakukan advokasi terkait layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

- Pilihan kerja berjejaring melalui pembentukan dan pembinaan JP2K adalah metode efisien dan efektif (terbatasnya waktu/periode dan sumber pendanaan)
- Baik YKP dan JP2K memiliki ragam modalitas sebelum kerja bersama ini.
- Pengalaman melakukan riset bersama dan menggunakannya untuk kerja advokasi berbasis data atau bukti menjadi pengetahuan bersama anggota JP2K.
- Praktik kerja advokasi berbasis data mampu meningkatkan efektivitas penyadaran kritis publik dan pemangku kepentingan di tiap wilayah serta kerja advokasi kebijakan baik di nasional maupun daerah.

Outcome 2

Pemerintahan Daerah dan Pusat melakukan perbaikan kebijakan dan implementasi kebijakan terkait layanan HKSR yang responsif terhadap perempuan.

YKP bersama JP2K berupaya menyuarkan hasil riset dan temuan-temuan lokal melalui rumusan rekomendasi dan petisi dalam forum-forum strategis bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu produk kebijakan kunci yang mendukung akses terhadap layanan HKSR adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI No.9 tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Outcome 3

OMS (ormas, kelompok masyarakat, media, akademik) melakukan aksi bersama mendorong perbaikan kebijakan terkait layanan kespro yang responsif terhadap perempuan.

Proses upaya dan hasil segera yang dicapai JP2K relatif memberi dampak lanjut. Kerja JP2K memantik kesadaran kritis banyak pihak akan realita terkait pemenuhan HKSR dalam JKN baik di tataran masyarakat, anggota JP2K (*sphere of influence*) serta pembuat kebijakan Pemerintah Daerah (*sphere of interest*). Beberapa indikasi menunjukkan prakarsa awal yang berpotensi optimal manakala kerja dilanjutkan dan didukung sumber dana, sarana dan tenaga ragam pihak. Berikut beberapa catatan indikasi itu.

- Seri riset yang diinisiasi YKP – JP2K menjadi praktik baik kerja berbasis data. Hal ini menjadikan kinerja ragam pihak termasuk Pemerintahan Daerah terukur dan akuntabel. Karenanya adalah penting untuk komunitas dan Pemda mengalokasikan dana dan terus menerapkan mekanisme pendataan dan pelaporan kinerja berkala dan partisipatif.
- Dialog yang dipantik data atau realita cenderung memunculkan kesadaran kritis. Perempuan dan warga mulai memahami haknya dan menyuarkan keluhan, pengaduan individual saat layanan tidak tersedia, akses tidak ada dan kualitas pelayanan rendah. Karenanya, fungsionalisasi wadah pengaduan komunitas yang baru ada di beberapa desa/kecamatan, sejatinya perlu diperluas di wilayah lain menggunakan dukungan Dana Desa.
- Kesadaran kritis kelompok dan komunitas secara kolektif juga telah mendorong mereka menyuarkan aspirasi terkait HKSR melalui mekanisme musrenbang perempuan, musrenbang desa, kecamatan, kabupaten/kota serta forum-forum strategis lainnya.

- Kerja bersama JP2K sangat membuka wawasan dan wacana HKSR pada OMS lintas isu/sector. GASIRA Maluku (pendampingan korban kekerasan perempuan), LKY Yogyakarta (pendampingan konsumen), SPEK-HAM Jawa Tengah (pendampingan korban pelanggaran HAM), Piar NTT (pendampingan korban pelanggaran HAM) adalah beberapa contoh unik. Kerja bersama mereka dalam JP2K memperkaya pengetahuan dan memantik kesadaran kritis mereka untuk memikirkan elemen HKSR dalam kerja-kerja mereka saat ini. Lebih lanjut, keperluan ini melahirkan kebutuhan untuk penguatan kapasitas dan alokasi sumber daya manusia (staf OMS) yang lebih menguasai dan berkompeten dalam HKSR. Pengarusutamaan HKSR di tataran OMS sungguh terjadi.

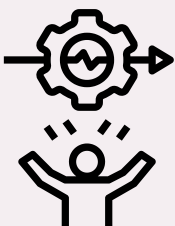
Pembelajaran

Kerja bersama JP2K merujuk kerangka program melahirkan sejumlah capaian dan hasil. Secara paralel, proses pelaksanaan upaya ini juga melahirkan begitu banyak pembelajaran. Ekspresi terkait dalam kuesioner, FGD maupun wawancara mendalam teramu dalam beberapa tema kunci berikut.



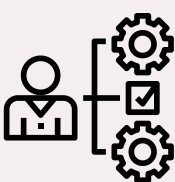
- Desain Program

Kerangka program menyelaraskan ragam upaya lintas aktor menunjukkan efektivitas. Pilihan kerja berjejaring (JP2K) untuk kerja advokasi berbasis riset di lima belas provinsi dalam waktu relatif singkat adalah pilihan tepat. Program berhasil memfasilitasi pembentukan, penyepakatan tatakelola, penguatan kapasitas teknis serta pengelolaan kerja riset, penyadaran dan advokasi bersama oleh JP2K di lima belas provinsi dan tingkat nasional.



- Pelaksanaan

Kajian atas pelaksanaan dan pemenuhan indikator kerja menunjukkan program ini efektif dan efisien melalui pilihan kerja berjejaring. YKP sebagai simpul pengelola (Koordinator JP2K) telah mengupayakan pelibatan semua anggota JP2K sejak fase perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, refleksi pembelajaran, evaluasi program hingga fasilitasi dialog tentang keberlanjutan JP2K.



- Tindaklanjut & Ruang untuk Perbaikan

YKP perlu meramu refleksi pembelajaran atas pengalaman sebagai pengelola simpul JP2K, maupun OMS penggiat isu HKSR. Pengetahuan ini akan melengkapi visioning terkini, penyusunan Rencana Strategis termasuk gagasan kerja/programatik, kerja berjejaring dan penggalangan sumber daya untuk ketahanan dan keberlanjutan YKP.

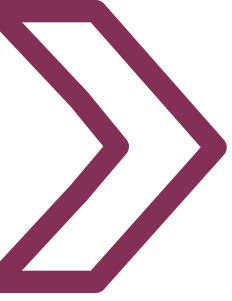
JP2K harus semakin mandiri dan tidak tergantung kepada YKP. Meski demikian, YKP perlu cermat memainkan peran memfasilitasi penyiapan kapasitas JP2K baik dari sisi pengkinian tatakelola maupun menjembatani akses JP2K terhadap mitra-mitra strategis global dan nasional. Pemberdayaan ini diasumsikan mendukung keberlanjutan karya JP2K.



KEBERLANJUTAN PROGRAM

Dalam rangka mendapatkan dukungan pendanaan sebagai salah satu upaya keberlanjutan kerja YKP untuk mencapai visi dan misi organisasi, maka selama periode 2019-2021 upaya mencari dukungan pendanaan melalui pembuatan proposal.

PROPOSAL	STATUS	KETERANGAN
Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (AIPTIS)	X	
UN Trust Fund to End Violence against Women	X	
Mama Cash-Support feminist initiative in developing public campaign	O	Menunggu pengumuman (status terakhir meminta rekomendasi/referensi dari dua Lembaga yang mengenal YKP-Kapal Perempuan & OXFAM Indonesia)
Global Fund	V	Program 1 tahun fokus pada Memajukan hak aborsi dan menciptakan peluang/kesempatan untuk kesehatan, hak, dan keadilan reproduksi
Right Here Right Now	V	Program 5 tahun yang fokus pada Pendidikan & Advokasi HKSR Bagi Orang Muda di 3 kabupaten Langkat, Jombang & Indramayu
UNFPA	V	Pembuatan modul Komunikasi & Perubahan Perilaku Terkait Kespro.



RENCANA SELANJUTNYA

Kedepannya tentu YKP harus lebih efektif dan inovatif dalam menjalankan program untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi. Situasi saat ini dimana semakin berkurangnya donor yang mau mendukung isu HKSR harus menjadi perhatian YKP. Konsistensi dan fokus pada isu menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi yang juga didukung dengan semangat volunter. Kerja working group menjadi salah satu trend donor dalam memberikan supportnya.

1. ADVOKASI

1. Meninjau kembali strategi advokasi YKP khususnya mendorong Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengimplementasikan PMK No 3 tahun 2016 untuk menunjuk secara resmi rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan aborsi aman.
2. Diskusi lanjutan dengan LPSK terkait penanganan perempuan korban kekerasan,
3. Memiliki panduan advokasi & strategi kampanye untuk membantu kerja-kerja YKP dan sebagai bahan pengetahuan.
4. Menyusun perangkat/tool untuk pengawasan publik terkait pemenuhan HKSR

2. DISKUSI, SOSIALISASI, DAN PELATIHAN

1. Memaksimalkan media-media publikasi YKP
2. Melanjutkan rencana YKP menjadi pusat informasi HKSR
3. Memaksimalkan ruang-ruang diskusi diantara klp orang muda, perempuan dan laki-laki dampingan YKP bersama pembuat kebijakan
4. Revitalisasi layanan Kespro Remaja melalui PKPR
5. Pelatihan advokasi dasar bagi kelompok-kelompok perempuan dan anak muda (influencer) untuk mendorong adanya perubahan kebijakan di daerah mereka.

3. MEMBANGUN JARINGAN

Melanjutkan/mempertahankan kegiatan kemitraan yang sudah terbangun selama ini

4. PUBLIKASI

1. Buku saku bagi Polisi terkait aborsi
2. Buku Pembelajaran mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan & perkawinan anak.

5. KELEMBAGAAN

1. Mengesahkan SOP Keamanan/Security
2. Memfinalkan SOP Kelembagaan



PEMBELAJARAN & KESIMPULAN

1. PEMBELAJARAN

Pembelajaran yang diperoleh selama tiga tahun ini diharapkan dapat memberikan catatan atau masukan penting untuk kedepannya, dengan harapan YKP akan lebih siap untuk merespon situasi dan kondisi baik dalam pelaksanaan program maupun urusan manajerial kelembagaan.

- Kerja berjejaring pada satu sisi dapat memberikan keberhasilan karena dapat saling berbagi peran, tugas, dan tanggung jawab dalam upaya-upaya advokasi. Tapi di sisi lain, memberikan tantangan sendiri, jika ada pihak yang membawa kepentingan pribadi sehingga melemahkan strategi yang sudah disusun bersama.
- Keberlanjutan program sangat dipengerahui oleh situasi politik apalagi jika ada pergantian pemimpin dan pemimpin yang tidak memiliki visi yang sama sehingga YKP harus melakukan evaluasi dan komunikasi mulai dari awal kembali.
- Peran aktif masyarakat dan remaja dalam pelaksanaan program YKP memperluas cakupan dan keberhasilan program yang dijalankan apalagi disituasi terbatasnya ruang gerak untuk bertatap muka maka kerja-kerja kelompok dampingan sangat membantu capaian program yang dijalankan YKP
- Meninjau kembali strategi advokasi dalam mendorong implementasi PP 61 tahun 2014 dan PMK No 3 tahun 2016 dengan mempertimbangkan situasi saat ini seperti Pandemi COVID 19 dan kerja Kemenkses yang lamban mengimplementasikan PP dan PMK.

2. KESIMPULAN

- YKP berhasil mem-branding dirinya menjadi organisasi yang fokus bekerja pada pemenuhan HKSR
- Sosialisasi yang dilakukan YKP terkait isu-isu HKSR berhasil membangun dukungan pihak-pihak/berbagai elemen di masyarakat untuk berjuang bersama-sama YKP dalam pemenuhan HKSR
- Strategi YKP dalam melibatkan Pemerintah Daerah cukup strategis, membuat Pemda memberikan perhatian terhadap isu HKSR. Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif pemda untuk pengembangan program HKSR di wilayahnya, seperti di Kab. Bojonegoro yang berhasil mendapatkan dukungan dana dari World Bank untuk penanganan penurunan AKI serta pembuatan media kampanye pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh Pemda sendiri.
- Secara keseluruhan banyak keberhasilan yang sudah dicapai oleh YKP selama tiga tahun terakhir. Diantaranya YKP mampu menjadi organisasi yang diperhitungkan oleh stakeholder mulai dari masyarakat, ormas, LSM, pemerintah dan lembaga dana. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk melaksanakan program di masa mendatang.
- YKP aktif melakukan transfer knowledge kepada masyarakat, pembuat kebijakan dan sebagainya dalam rangka merubah persepektif HKSR di masyarakat.

TABEL TARGET RENSTRA YKP 2018 -2021

1. KEMASYARAKATAN

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN	CAPAIAN
1.1.	PENEGAKAN HUKUM PEMENUHAN HKSR Berjalannya sistem hukum yang dapat menjamin pemenuhan hak HKSR pada layanan JKN dan aborsi aman tanpa diskriminasi dan kriminalisasi	Adanya fasilitas layanan Kespro yg terjangkau & berkualitas yg ditunjuk pemerintah	Sampai saat ini belum ada layanan aborsi aman yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah baru mempersiapkan penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam layanan ini.
		Adanya fasilitas kesehatan penanganan aborsi aman di tingkat provinsi & kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Baru sebatas inisiatif layanan asuhan paska keguguran (APK) pada 2 puskesmas Bungkall & Kauman dan 1 RS Muhamadiyah di kab Ponorogo. • Sedangkan inisiatif kelompok dampingan YKP melalui orang muda mendorong adanya pos kesehatan HKSR di desa Ciluk menggunakan dana desa.
		Adanya dokter dan konselor yg berkomitmen untuk pelayanan HKSR	Bersama jaringan Save All Women & Girl (SAWG) dimana anggota jaringan tsb (individu) dari petugas kesehatan & konselor yang memiliki komitmen dalam pemenuhan HKSR
		Masyarakat memahami hak-haknya terkait HKSR & aborsi aman	Disituasi COVID 19 YKP aktif memberikan informasi HKSR melalui media online dan banyak melakukan kampanye secara online dan beberapa secara offline.
		Aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi	Masih terjadi kriminalisasi kepada pemberi layanan kesehatan

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN	TARGET
1.2. PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK Berkembangnya kebijakan yang tidak mentolerir perkawinan usia anak	Terbitnya Perpu/Perpres pencegahan perkawinan usia anak	Disahkannya Revisi UU Perkawinan Anak NO 16 tahun 2019 dimana usia minimum menikah anak perempuan sama seperti anak laki-laki menjadi 19 tahun.	
	Mendorong keluarnya Perbup pendewasaan usia nikah	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada 3 Perbup Pendewasaan Usia Menikah (Kab. Ponorogo, Bojonegoro & Blitar) • 2 Perda (Kab Ponorogo & Blitar) 	
	Berkembangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya/dampak perkawinan usia anak	Melakukan kampanye We For Hers bersama kelompok dampingan.	
	Menguatnya jaringan yang aktif menyuarakan pencegahan pernikahan usia anak.	Tercapai.	
1.3. PENDIDIKAN ATAU PENYADARAN TENTANG HKSR Terbangunnya kepedulian publik/masyarakat dan media masa terhadap pentingnya pemenuhan hak HKSR	Media masa cetak dan online bergerak memberitakan tentang isu isu seputarHKSR.	Tercapai. YKP melakukan media gathering kepada sejumlah jurnalis dan mengadakan lomba artikel terkait isu HKSR	
	Masyarakat bergerak untuk menyuarakan dan/atau mengkampanyekan HKSR.	Tercapai. Kegiatan terlampir	
	Remaja aktif menyuarakan dan berperilaku hidup sehat dan sadar hak	Tercapai. Kegiatan terlampir	

2. KELEMBAGAAN

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN	TARGET
2.1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Berfungsinya sistem ketenagaan YKP untuk menyediakan SDM yang berkualitas untuk menjalankan program dan organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rencana program pengembangan kapasitas staf dan implementasinya untuk jangka pendek dan periode 3 tahun ke depan (2018 – 2021). 	Tercapai. Sejumlah SOP disusun YKP untuk membantu YKP dalam menjalankan kegiatannya.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dan berfungsinya SOP ketenagaan YKP 	Teridentifikasi kebutuhan dan peningkatan apa yang dapat dilakukan oleh staff.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya sistem dan perangkat (tool) evaluasi kinerja staf yang dijalankan efektif untuk memastikan SDM yang berkualitas 	Selama Pandemi pengukuran kinerja staff dilakukan dengan metode mulai mengukur diri sendiri, review supervise dan review pengurus/Lembaga.
2.2. PENGEMBANGAN TATA KEPENGURUSAN (GOVERNANCE) DAN STRUKTUR ORGANISASI Meningkatkan efektifitas tata kepengurusan (governance) dan struktur organisasi YKP untuk menjalankan program dan organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Yayasan).		<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya tata kelola dan kepengurusan (governance) yg baol • Berkembangnya efektifitas struktur dan sistem internal organisasi yg akuntabilitas • Terbentuknya Pokja sesuai yang dibutuhkan menjalankan program dan misi yang telah ditetapkan. • Berkembangnya efektifitas sistem keuangan 	Tercapai
2.3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN & PEMBELAJARAN Berfungsinya sistem atau mekanisme pengelolaan pengetahuan YKP terkait HKSR		<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya fungsi resource centre YKP terkait HKSR. • Terumuskannya produk-produk pengetahuan dari pengalaman YKP untuk mendukung tercapainya rencana YKP menjadi pusat studi. 	Tercapai Adanya berbagai pendokumentasi pengalaman tentang gerakan perempuan dalam memperjuangkan HKSR..

2. Lampiran Kegiatan

NO.	KEGIATAN TAHUN 2019	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
1.	Diskusi Thursday Talk Pemenuhan Layanan Aborsi bagi Korban Perkosaan; Ada atau Tidak Ada	-	
2.	Pertemuan Lokal Meeting Jaringan Nasional Stunting Sebagai Dampak Dari Perkawinan Anak	43	Diskusi yang dilakukan oleh YKP dengan mitra baik individu maupun jaringan dengan membahas berbagai isu terkait. Kegiatan dihadiri oleh Bapak Subandi dari Bappenas dan Bapak Iing Mursalin dari TNP2K sebagai Narasumber membahas penyusunan strategi bersama dan peran-peran yang dapat diambil untuk mengakhiri stunting.
3.	Pelatihan Keterlibatan Laki-laki dalam Pencegahan KTPAP dan PA di Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo dan Kab. Blitar	70	Penguatan kapasitas terkait HKSR bagi laki-laki yang berperan penting pada terjadinya perkawinan anak. Peserta merupakan laki-laki dari berbagai latar belakang seperti karang taruna, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, anggota kelompok keagamaan/masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, HMI. Peserta pelatihan ditugaskan untuk menyosialisasikan hasil pelatihan kepada komunitasnya masing-masing. Penguatan kapasitas lanjutan yang lebih komprehensif bagi kelompok perempuan dan anak muda yang dapat menjadi pendamping kasus KTPAP dan PA dan membuka posko layanan pengaduan di komunitasnya masing-masing
4.	Pelatihan Mekanisme Layanan Pengaduan KTPAP dan PA bagi Kelompok Perempuan dan Anak Muda di Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo dan Kab. Blitar	88	Penguatan kapasitas bagi kelompok perempuan dan anak muda Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo dalam melakukan advokasi kebijakan di wilayahnya masing-masing
5.	Pelatihan Advokasi Untuk Perempuan Dewasa Dan Remaja Perempuan Dalam Pemenuhan Hak Untuk Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Perempuan Dan Perkawinan Anak	35	Modul Komunikasi yang sudah ditulis oleh Bapak Dony Hendrocahyono dilakukan uji coba oleh staff YKP dan diberi masukan terkait metode-metode yang ada di dalam modul tersebut
6.	Pembuatan & Uji Coba Modul Komunikasi	7	Penguatan kapasitas bagi anak muda sebagai agen perubahan untuk melihat potensi yang dimiliki dan bisa mengambil peran dan ruang bagi anak muda di publik dalam mencegah KTPAP dan PA. Anak muda juga dapat memanfaatkan hal yang paling dekat dengan dirinya seperti dunia digital sebagai media yang positif yang dapat berkontribusi dalam pencegahan KTPAP dan PA

NO.	KEGIATAN TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
1.	Mengadakan pelatihan tentang kesadaran kritis dengan metode Participatory Action Research (PAR) terkait kontrasepsi dan perencanaan kehamilan kepada Key Influencer kelompok perempuan dewasa dan kader kesehatan.	26 Key Influencer dari Kelompok Perempuan	Perwakilan individu terpilih dari kelompok dampingan YKP terlatih sebelumnya, yang kemudian disebut Key Influencer, mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesadaran kritis.
2.	Menfasilitasi key influencer kelompok perempuan dewasa untuk mendukung kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran kritis terkait informasi kespro khususnya perencanaan kehamilan dan APK kepada kelompok perempuan usia subur di wilayah sekitar.	72 orang penerima manfaat dengan mengadakan 4 kegiatan secara offline dan menerapkan protokol kesehatan.	Key Influencer melakukan 4 kegiatan penjangkauan kepada masyarakat secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, difasilitasi oleh kelompok key influencer dan didukung oleh puskesmas dan pemerintah desa.
3.	Evaluasi pasca kegiatan penjangkauan/edukasi kepada key influencer perempuan dewasa	1 orang perwakilan key influencer perempuan yang merupakan anggota BPD siap mengawal penyusunan RPJMDES	Key Influencer dapat memetakan kebutuhan lanjutan kelompok masyarakat khususnya perempuan di wilayah desa mereka. Dan beberapa orang diantara mereka mulai berinisiasi untuk melakukan audiensi kepada pemerintah desa terkait penggunaan dana desa.
4.	Mengadakan pelatihan tentang kesadaran kritis dengan metode Participatory Action Research (PAR) terkait kontrasepsi dan perencanaan kehamilan kepada Key Influencer kelompok perwakilan remaja.	19 Key Influencer dari Kelompok Remaja	Perwakilan kelompok remaja dampingan YKP dan beberapa remaja perwakilan desa, yang selanjutnya disebut Key Influencer, terkapasitasi terkait penggunaan kesadaran kritis dan memiliki data terkait permasalahan remaja seputar kesehatan reproduksi.
5.	Mengadakan pelatihan komunikasi interpersonal dan teknik dasar konseling kepada key influencer remaja dan teman sebaya remaja.	19 Key Influencer dari Kelompok Remaja	Key Influencer memiliki kapasitas yang lebih kuat terkait komunikasi interpersonal dan konseling dasar dalam menjangkau kelompok remaja di desa.
6.	Menfasilitasi key influencer remaja dalam melakukan penjangkauan kepada remaja perempuan dan teman sebaya remaja perempuan untuk mulai mencari informasi yang valid dan mendukung serta tidak menghakimi remaja lainnya terkait perencanaan masa depan.	144 orang penerima manfaat dengan mengadakan 4 kegiatan secara online dan offline dengan menerapkan protokol kesehatan.	Key Influencer remaja melakukan 4 kegiatan penjangkauan, online dan offline. Pada penyusunan kegiatan yang akan dilakukan, remaja telah mampu merumuskan ide dan inisiasi baru dalam penyampaian informasi dan menjangkau kelompok remaja lainnya. Key Influencer remaja memutuskan untuk mengadakan 1 kegiatan online yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan, kegiatan online ini dihadiri oleh 73 orang dari dalam dan luar Kabupaten Poorogo.
7.	Evaluasi paska kegiatan penjangkauan kepada key influencer remaja perempuan dan teman sebaya remaja perempuan.		Perwakilan Key Influencer remaja melihat adanya kebutuhan ruang bagi remaja desa untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Hal ini mendorong mereka untuk menyusun rencana audiensi dan advokasi kepada pemerintah desa untuk penyediaan hal tersebut.

NO.	KEGIATAN TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
8.	Mengadakan diskusi bersama kelompok komunitas, seperti Ahli Agama, Media, Ahli Hukum, untuk menyusun strategi advokasi terkait implementasi PP 61.	5 lembaga pemerintah Kabupaten Ponorogo 79 Penerima manfaat	Dilakukan 2 kegiatan diskusi online tentang Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan Kondisi Perempuan di masa Pandemi. Pada diskusi ini terlibat langsung Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang P3A Dinas Sosial, Ketua Unit Pelayanan dan Pendampingan Kabupaten Ponorogo, dan Kepala Puskesmas Bungkal.
9.	Mengadakan audiensi kepada organisasi profesi serta dinas dan lembaga terkait, seperti POGI, HOGSI, Bappenas, dan KemenPPA Terkait implementasi PP 61	2 Lembaga pemerintahan pusat 3 Organisasi Masyarakat 2 tokoh ahli 174 penerima manfaat	Kementerian kesehatan menyatakan bahwa akan segera mengimplementasikan PMK No.3 tahun 2016 dengan menerbitkan panduan awal penunjukan puskesmas dan rumah sakit yang menyediakan layanan asuhan paska keguguran. Dialog khusus yang membahas terkait layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dilakukan dengan baik bersama BKKBN, Purn. Komjen Pol Suhardi Alius, dan Prof.Meiwita Budiharsana (Ahli Kesehatan Masyarakat UI). Selanjutnya diskusi terkait Aspek Penanganan Hukum & Layanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Komprehensif, dilakukan bersama 3 perwakilan organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu tersebut.
10.	Melaksanakan diskusi jaringan tingkat nasional, yang diikuti oleh seluruh lembaga dan kelompok komunitas, serta pemerintah nasional.	2 Pemerintah desa di Kecamatan Kauman (Advokasi) 99 Penerima Manfaat (Diskusi Nasional)	Key Influencer remaja melakukan audiensi yang advokasi kepada 2 Pemerintah Desa, yaitu Kauman dan Ciluk terkait pembetulan Pos Pelayanan Remaja di tingkat desa. Kepala desa Ciluk dan bidan di desa Ciluk sangat setuju dan mendukung inisiasi yang disampaikan oleh perwakilan remaja, dukungan yang diberikan berupa penyediaan anggaran desa tahun 2020 terkait hal ini. Diskusi Nasional terkait upaya pemenuhan HKSR di tingkat desa bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berjalan dengan baik dan memberikan banyak insight baru terkait SDGs desa yang nantinya dapat menjadi peluang bagi kelompok dampingan di berbagai daerah di Indonesia, diskusi ini dihadiri oleh 99 orang.

NO.	KEGIATAN TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
11.	Hearing Kemenkes terkait Permenkes	67 Peserta	Kegiatan diskusi secara daring yang pertama kali dilakukan oleh YKP untuk tetap produktif di tengah pandemi. Layanan kontrasepsi yang sulit diakses selama pandemi menyebabkan tingginya KTD di tengah pandemi. Diskusi melibatkan para narasumber ahli seperti Ibu Prof. dr. Meiwita Budiharsana, MPH, PhD, Guru Besar UI/Pengurus YKP, dr. Sarsanto Wibisono, Sp.OG dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)/Badan Pengawas YKP dan Ibu Yulianti seorang Perempuan Pengguna Alat Kontrasepsi
12.	Webinar Alternatif Kontrasepsi di tengah Pandemi		
13.	Webinar Kesehatan Mental Remaja di tengah Pandemi	45 Peserta yang hadir	Webinar yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting mengangkat kesehatan mental remaja di tengah pandemi. Diskusi ini menghadirkan narasumber Ibu Indah Sundari J, M.Psi., Psikolog, seorang Psikolog, Presenter TV, yang juga merupakan pendiri Aditi Psychological Center dan Saudari Esa Maharani, aktivis muda HKSR dari Kab. Ponorogo. Diskusi membahas apa saja yang bisa dilakukan oleh remaja saat pandemi untuk menjaga kesehatan mental.
14.	Jurnal KISAH KAMI (Penyintas Kekerasan)	5 penulis dari kota dan cerita yang berbeda-beda	Sebuah dokumentasi apa yang dialami perempuan dan anak perempuan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Buku ini juga bertujuan untuk memaparkan kisah nyata terkait tantangan yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan hak-haknya, mulai dari norma budaya dan sosial yang masih bias gender atau masi mendiskriminasi perempuan, hingga terbatasnya akses informasi serta layanan terkait kesehatan reproduksi yang berkualitas yang menyebabkan perempuan sulit untuk mengambil keputusan yang terbaik atas tubuhnya. Ditulis oleh lima orang di lima kota dengan latar belakang dan cerita yang berbeda-beda yaitu Jambi, Bali, Jayapura, Cirebon dan Jakarta.

NO.	KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
16.	Local Meeting Situasi Paska Perubahan Kebijakan UU Perkawinan	37 penerima manfaat dari mitra individu maupun jaringan	Diskusi yang secara regular dilakukan oleh YKP mengundang Bapak Mardi Chandra (Hakim Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Drs. Muhajir), Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Bapak Achmad Maqin, S.Fil.I (Kepala KUA Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro) dan Ibu Bestha (MAPPI FH UI) membahas situasi paska perubahan kebijakan UU Perkawinan dan PERMA No. 5 terkait dispensasi kawin
17.	VCAT bagi Jurnalis dalam Pemberitaan yang benar terkait KTPAP dan PA	22 orang yang berprofesi sebagai jurnalis/ wartawan media online di Kabupaten Bojonegoro, Ponorogo, Blitar dan provinsi Jawa Timur (kota Surabaya)	Jurnalis di tingkat lokal dan provinsi diberi penguatan kapasitas terkait HKSJR dan isu KTPAP dan PA untuk dapat menulis berita yang baik dan berpihak kepada korban KTPAP dan PA. Penguatan ini dilakukan menggunakan metode yang partisipatif serta memberikan ruang diskusi yang luas dengan menghadirkan narasumber Ibu Sonya Hellen, seorang jurnalis senior dari media Kompas yang berbagi pengalaman terkait menulis pemberitaan yang berpihak pada korban KTPAP dan PA. Peserta juga didorong untuk dapat menulis pemberitaan perkawinan anak di daerahnya masing-masing dengan menggunakan narasi yang baik bagi korban serta dapat mempengaruhi pemerintah daerah agar dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk mencegah kasus perkawinan anak.
18.	Workshop Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur	61 orang hadir dalam workshop ini. Dihadiri oleh perwakilan Dinas P3AKB Provinsi Jawa Timur, serta dinas dan pengaduan agama dari Kabupaten Bojonegoro, Ponorogo dan Blitar serta jurnalis yang sedang mengikuti pelatihan VCAT bagi jurnalis.	Hasil dari Evaluasi program menciptakan ruang di Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo yang telah ditulis oleh Bapak Roy Tjiong dipresentasikan pada workshop ini sebagai materi diskusi dengan narasumber lain seperti Ibu Dra. Budi Lestari dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan Ibu Dian Ika Sukmawati, Kelompok Perempuan GPPB Kab. Bojonegoro. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari deputi bidang perlindungan anak KemenPPPA RI sebagai keynote speech diskusi, pemerintah provinsi Jawa Timur dari Dinas P3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo membahas strategi yang bisa dilakukan bersama antar pemerintah provinsi dan daerah dalam menurunkan angka perkawinan anak.
19	FGD Evaluasi Program Creating Spaces	450 Responden Kuantitatif & Kualitatif	Evaluasi program Menciptakan Ruang yang telah berjalan 4 tahun terkait pencegahan KTPAP di Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo sebagai pembelajaran YKP dan mitra di daerah. Penulisan ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan penerima manfaat langsung dan tidak langsung dari program Menciptakan Ruang melalui FGD, interview dan depth interview 150 responden dari masing-masing kabupaten
20	Webinar Bincang Kekerasan Seksual Kab. Blitar: Pencegahan Kekerasan dalam Pacaran dan Pendampingan Remaja KTD	53 peserta hadir dalam kegiatan ini	Kegiatan dilakukan oleh kelompok remaja RP3A Kab. Blitar dan peserta yang hadir didominasi oleh remaja. Diskusi dalam webinar ini membahas kasus kekerasan dalam pacaran yang sering terjadi di kehidupan remaja dan bagaimana pendampingan remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

NO.	KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
21.	Pelatihan Kampanye Membangun Opini Publik Menggalang Dukungan Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Ponorogo	Diikuti oleh 69 peserta dari Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo perwakilan dari kelompok perempuan, kelompok laki-laki dan kelompok anak muda.	Pelatihan ini merupakan pelatihan pertama yang dilakukan oleh YKP dengan metode daring melalui platform Zoom Meeting karena adanya pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari dan menghasilkan 69 materi kampanye terkait pencegahan KTPAP dan PA dari berbagai media seperti poster, podcast, video, dan infografis, artikel sebagai bahan advokasi untuk daerah masing-masing. Di akhir kegiatan, peserta dilatih untuk menjadi enumerator pengambilan data terkait dispensasi kawin yang untuk pengumpulan data diska di daerah masing-masing
22.	Youth Fun Camp (YFC) : Tubuhku Tanggung jawabku oleh Kelompok Anak Muda	24 remaja di Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan ini	Pelatihan ini merupakan gagasan dari kelompok anak muda RP3A Kabupaten Blitar dengan menggandeng Ketua Kelompok Laki-laki untuk menjadi salah satu fasilitator dalam pelatihan tersebut. Diikuti oleh remaja laki-laki dan perempuan yang masih duduk dibangku SMA di Kabupaten Blitar. selain mengenalkan materi tentang KTPAP dan PA, pelatihan ini juga semakin menarik dengan diskusi dan fun game untuk lebih memahami materi yang disampaikan.
23.	Pengenalan Kespro Pada Anak Usia Sekolah Dasar	55 orang mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh RP3A Kab. Blitar	Desa Mauk Kab. Blitar di Desa Disabilitas Menonton film bersama Tau Gak Sih terkait Kespro. sosialisasi ini diikuti oleh siswa dan siswi kelas 4 dan kelas 5 SD serta guru pendamping di sekolah tersebut.
24.	Pelatihan bagi Tenaga Pendidik Tingkat PAUD/TK/SD Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	93 peserta tenaga pendidik dari Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	Tenaga pendidik tingkat PAUD/TK/SD diberi penguatan kapasitas pendidikan HKSR sebagai upaya pencegahan KTPAP dan PA oleh champion kelompok dampingan daerah seperti kelompok perempuan, kelompok anak muda dan kelompok laki-laki. Peserta juga dilatih untuk dapat menyosialisasikan kepada rekan tenaga pendidik di sekolah, orangtua dan siswa/i di sekolah dan diberi modul pendidikan kespro YKP untuk dapat melatih tenaga pendidik lainnya dalam mencegah KTPAP dan PA. Peserta yang hadir tidak hanya dihadiri oleh guru perempuan tapi juga laki-laki yang merupakan walikelas atau pendamping
25.	Pelatihan bagi Tenaga Pendidik Tingkat SMP/SMA/SLTA/MA Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	89 peserta tenaga pendidik dari Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	Tenaga pendidik tingkat SMP/SLTP/Mts/SMA/SLTA/MA diberi penguatan kapasitas pendidikan HKSR sebagai upaya pencegahan KTPAP dan PA oleh champion kelompok dampingan daerah seperti kelompok perempuan, kelompok anak muda dan kelompok laki-laki. Peserta juga dilatih untuk dapat menyosialisasikan kepada rekan tenaga pendidik di sekolah, orangtua dan siswa/i di sekolah dan diberi modul pendidikan kespro YKP untuk dapat melatih tenaga pendidik lainnya dalam mencegah KTPAP dan PA. Peserta yang hadir merupakan guru BK, Kesiswaan, dan guru Biologi

NO.	KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
26.	Dialog Bersama Kelompok Masyarakat Desa Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	289 orang masyarakat dari Kab. Ponorogo, Kab. Blitar dan Kab. Bojonegoro	Masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat seperti PKK, Fatayat, Aisyiyah, arisan, RT, RW, Tahlil, kelompok tani, karang taruna, guru serta pengurus di pondok pesantren ikut dalam dialog bersama membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak. Kelompok masyarakat diajak diskusi untuk mengidentifikasi masalah, memetakan penyebab masalah, peran apa yang bisa dilakukan dan apa rekomendasi yang bisa diajukan ke pemerintah desa pada diskusi selanjutnya. Faslitator kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok masyarakat menyampaikan hasil diskusi dan membuat kesepakatan bersama rekomendasi/usulan yang akan disampaikan pada pertemuan bersama pemerintah desa di dialog selanjutnya.
27.	Dialog Bersama Pemerintah Desa Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	321 peserta yang hadir terdiri dari pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dari Kab. Blitar, Kab. Ponorogo dan Kab. Bojonegoro	Dialog bersama dilakukan secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat desa dan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa dan BPD. Selain itu hadirnya dari OPD Kecamatan seperti Camat, PLKB, KUA Kecamatan, Sekolah, Puskesmas dan instansi lain menjadikan dialog bersama ini semakin aktif dan hidup. Peserta diajak berdiskusi bagaimana mencegah terjadi kekerasan pada perempuan dan perkawinan anak serta kebijakan atau tindak lanjut rekomendasi dari masyarakat serta apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing instansi.
28.	Webinar 16HAKTP: Anak Perempuan dan Pendidikan Kab. Blitar	66 peserta yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mendaftar melalui website atau sosial media YKP	Selama pandemi Covid-19, YKP berkomitmen untuk tetap produktif dengan mengadakan diskusi secara daring melalui webinar. Hal ini juga dibarengi dengan produktifnya sosial media YKP seperti website dan instagram YKP yang terus meluas jangkauannya. Diskusi ini diinisiasi oleh kelompok anak muda RP3A Kab. Blitar dalam memperingati Kampanye 16HAKTP 2020. Diikuti oleh Ibu Anggia Ayu dari kemendikbud RI, Bapak Eka Purwanta kepala dinas DPPKBP3A Kab. Blitar sebagai penanggap diskusi terkait remaja yang mengalami KTD yang tidak mendapat akses pendidikan.
29.	Webinar 16HAKTP: Hadirnya Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan	66 peserta yang hadir yang mendaftar melalui website dan sosial media YKP	Dalam merayakan Kampanye 16HAKTP 2020, YKP mengadakan diskusi terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan RUU PKS yang mengundang narasumber dari pihak sipil dan pemangku kebijakan seperti KemenPPPA RI, Komnas Perempuan, UPPA Bareskrim Polri, Anggota DPR RI. Namun, Ibu Lisda dari Komisi VIII DPR RI berhalangan hadir sehingga diskusi hanya membahas terkait KTPAP dan PA dan upaya yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait tanpa adanya perkembangan RUU PKS di parlemen saat ini

NO.	KEGIATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2020	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
30.	Webinar 16HAKTP: Urgensi Informasi Hak Kespro sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak	120 peserta yang mengikuti daring melalui zoom dan youtube YKP TV. Peserta mayoritas anak muda yang terdaftar melalui link dan tersebar dari berbagai wilayah.	Selama pandemi COVID-19, Kelompok dampingan YKP terus berinovasi dalam berkegiatan dan kampanye pencegahan KTPAP dan PA. Seperti yang dilakukan oleh Kelompok Anak Muda PKADP Kab. Bojonegoro yang memperingati 16HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) dengan mengadakan webinar secara daring. Diskusi diisi oleh kelompok anak muda sebagai narasumber dan melibatkan narasumber lain seperti Ibu Zahra Direktur PKBI Jawa Timur, Ibu dr. Lucky Imroah Kasie Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro Ibu dr. Anik Yuliansih Kepala Dinas P3AKB Kab Bojonegoro.
31,	Webinar 16HAKTP: SEBAR PAP (Sehari Bersama Paguyuban Anak Ponorogo) oleh Kelompok Anak Muda Kab. Ponorogo	80 peserta hadir mengikuti kegiatan ini.	Diskusi yang diinisiasi oleh kelompok anak muda PAP Kab. Ponorogo sebagai kontribusinya dalam merayakan Kampanye 16HAKTP.

NO.	KEGIATAN TAHUN 2021	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
1.	Diskusi Tindak Lanjut Pertemuan bersama Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo	131 peserta	Pertemuan tindak lanjut dari kegiatan 2020 yang diinisiasi oleh kelompok anak muda untuk melakukan advokasi di tingkat desa dan kecamatan. Pertemuan ini hanya melibatkan key influencer dan pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan untuk mendorong hasil pertemuan dari kelompok masyarakat yang tertunda dari pertemuan sebelumnya. Adanya hasil diskusi seperti pembentukan posyandu remaja di tingkat desa, kolaborasi antara masyarakat desa dengan P2TP2A dalam melakukan pendampingan korban KTPAP dan PA, penguatan kapasitas HKSR untuk remaja desa yang didukung oleh pemerintah desa, penguatan pada orangtua untuk menjaga kedekatan keluarga, serta sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan desa dalam upaya pencegahan KTPAP dan PA.
2.	Webinar Yuk Jadi Pelopor dan Pelapor Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak Kab. Ponorogo	76 peserta	Diskusi yang diinisiasi oleh kelompok anak muda dan kelompok perempuan Kab. Ponorogo yang melibatkan champion kelompok anak muda dan kelompok perempuan yang menjadi narasumber diskusi.

NO.	KEGIATAN TAHUN 2021	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
3.	Webinar IWD: Superwomen for Women	93 peserta yang mendaftar melalui sosial media dan website YKP	Diskusi di tingkat nasional dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 agar dapat menginspirasi perempuan lain di berbagai bidang profesi. Melibatkan narasumber dari bidang politik Ibu Nanik Lusetiyani, S.Sos, M.M, Camat perempuan dari Kec. Balen Kab. Bojonegoro, aktivis perempuan Ibu Ai Yanidari Federasi Serikat PEKKA, serta Ibu Uswatun Khasanah seorang pengusaha Grosir Baju dari Kota Bekasi. Diskusi ini menyoroti peran perempuan di masyarakat yang dapat mandiri secara finansial sebagai upaya mencegah kebergantungan hidup pada orang lain seperti suami, orangtua maupun anak dan mampu mendorong perempuan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi perempuan sangat penting untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan.
4.	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja dan Pencegahan Perkawinan Anak	49 orang yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan aktif.	Kelompok Anak Muda PKADP (Forum Pencegah Kekerasan Anak Dan Perempuan) bersama Forum Anak Bojonegoro meningkatkan jangkauan kampanye isu KTPAP dan PA di Panti Asuhan Nurur Rohman 01 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Selama ini kegiatan masih dilaksanakan di sekolah formal maupun di kelompok masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pengurus Panti Asuhan, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diisi oleh Nurintias Lestari Ketua PKADP Bojonegoro yang menjadi Narasumber dan M. Abdul Ghony An Nabalasiy Ketua Forum Anak Bojonegoro yang menjadi fasilitator. Dalam sosialisasi tersebut diisi dengan penyampaian materi hak kesehatan reproduksi pada remaja, mengenali tubuh laki-laki dan perempuan serta pencegahan perkawinan anak. Acara dikemas dengan fun game sehingga peserta aktif dan antusias.
5.	Youth Camp Saatnya Anak Muda Bicara Seksualitas	32 peserta yang terpilih melalui seleksi yang dilakukan oleh kelompok anak muda RP3A Kab. Blitar	Kegiatan diinisiasi oleh kelompok anak muda RP3A Kab. Blitar untuk anak muda Kab. Blitar yang tertarik pada isu pencegahan KTPAP dan PA. pPserta dipilih melalui seleksi berdasarkan motivasi peserta terhadap isu pencegahan KTPAP dan PA. Peserta Youth Camp mendapatkan materi terkait HKSR yang difasilitasi oleh champion kelompok anak muda dan kelompok laki-laki Kab. Blitar. Setiap peserta diminta untuk membuat produk kampanye terkait pencegahan KTPAP dan PA seperti seperti podcast, video tanya jawab, dan postingan Instagram untuk mengajak dan menginformasikan pentingnya edukasi HKSR sejak dini serta mengajak masyarakat lebih sadar pentingnya mencegah KTPAP dan PA

NO.	KEGIATAN TAHUN 2021	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
6.	Pelatihan Digital Kampanye 19/21/...	73 peserta yang terpilih dari 190 peserta yang mendaftar secara daring melalui iklan yang dipasang oleh YKP di sosial media dan website. Kegiatan ini dilakukan secara daring selama 2 bulan melalui platform Zoom Meeting	Pelatihan Kampanye Digital bagi Anak Muda dari Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro dan Kab. Ponorogo di luar kelompok dampingan YKP yang bertujuan untuk memperluas jangkauan anak muda lainnya. Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Kampung Halaman, sebuah lembaga yang fokus pada kampanye digital dan anak muda di isu perempuan & anak. Peserta mendapatkan materi Pendidikan HKSR, dasar-dasar remaja bermedia, bagaimana memproduksi konten yang kreatif, serta menyusun materi kampanye sesuai dengan isu yang ada di tengah anak muda seperti KTD, Perkawinan Anak, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan Kekerasan dalam Pacaran. Dari lima isu yang telah disusun oleh peserta kemudian menjadi materi kampanye digital yang disosialisasikan melalui platform sosial media masing-masing
7.	Webinar Peluncuran Buku Saku bagi Hakim Agama	67 peserta	YKP bekerjasama dengan Hakim Agama Mahkamah Agung RI, Bapak Mardi Chandra menulis buku pedoman bagi hakim agama terkait dispensasi kawin yang diluncurkan melalui diskusi dengan melibatkan narasumber dari nasional dan daerah yaitu Bapak Dr. Bapak Mardi Candra, S.Ag., M.H dari Mahkamah Agung RI, Bapak Drs Maftuh Basuni, M.H, Hakim agama Kab. Bojonegoro, dan Wendy dari perwakilan aktivis anak muda Kab. Ponorogo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ibu Agustina Erni dari KemenPPPA dan Bapak Dr. Drs. Lalu Makripuddin M.Si dari BKKBN RI.
8.	Sosialisasi kepada Teman Sebaya dalam Upaya Pencegahan KTPAP dan PA Kab. Blitar	160 peserta dari 4 Sekolah	Sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan digital kampanye 19/21/... di MTsN 8, SMAN 1 Talun, SMPN 1 Kesamben, dan SMAN Srengat Kab. Blitar. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan tema KBGO dan Kekerasan dalam keluarga
9.	Webinar Ngabuburit Bareng PAP dengan tema: Married by Accident: Solusi atau Derita? Kab. Ponorogo	64 peserta	Menghadirkan narasumber champion anak muda Kab. Ponorogo dan Ibu Lis Suwarni, S.ST., M.Kes Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Ponorogo. Diskusi banyak menjelaskan terkait dampak dan resiko hamil di usia remaja bagi Kesehatan dan masa depan remaja. Webinar diikuti oleh 64 orang dengan rentang usia 16-59 tahun, mayoritas peserta berusia muda. Dalam webinar selain dari remaja Ponorogo juga menjangkau dari Blitar, Bojonegoro, Tulungagung, Surakarta, Purworejo, Sukoharjo, Tangerang, Serang, Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Barat.

NO.	KEGIATAN TAHUN 2021	CAPAIAN	
		Kuantitatif	Kualitatif
10.	Webinar Pendidikan HKSR dalam Pola Pengasuhan Orangtua sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak	80 peserta	Thursday Talk 12 setiap hari Kamis dilaksanakan kembali oleh YKP, kali ini sebagai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021. Dalam webinar ini YKP mengangkat tema Pendidikan HKSR dalam pola pengasuhan orangtua sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Hal ini juga dilakukan mengingat selama pandemi, angka perkawinan anak meningkat. Narasumber dalam webinar ini yaitu Ibu Wara Pertiwi dari Kemenkes, Ibu Tiara Erlita Psikolog Klinis Anak dan Remaja dari Keluarga Kita sebuah lembaga yang berfokus pada isu pengasuhan, Ibu Rusmiati perwakilan orang tua dari Kab Bojonegoro dan Irnandhini Putri, seorang aktivis muda HKSR dari Kab. Blitar
11.	Webinar International Women's Day Kab. Blitar: Day Setara itu Nyata	32 peserta	Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, kelompok anak muda Kab. Blitar mengadakan webinar yang mengangkat tema perempuan pekerja. Diskusi ini bertujuan untuk mengubah stigma perempuan pekerja yang selama ini dianggap lebih rendah dari pekerjaan lainnya karena budaya patriarki dan marginalisasi kaum perempuan. Menghadirkan narasumber Ibu Arumi Marzudy seorang mantan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan Ibu Rima Astuti seorang pendamping buruh perempuan. Mereka berbagi pengalaman bagaimana tantangan menjadi pekerja migran dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma pekerja migran.

3. Lampiran Publikasi

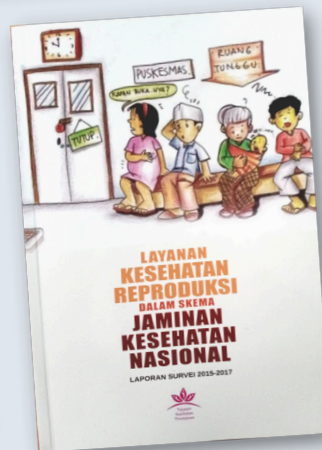
2019



2020



BUKU



2021

AUDIO VISUAL



AUDIO



Sekretariat: Jl. Kaca Jendela II No. 9, Rawajati Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Phone +62 21 790 2112 - Fax +62 21 790 2102 - Email office@ykp.or.id

 ykp.or.id  [ykesehatanperempuan](https://www.facebook.com/ykesehatanperempuan)  [ykesperempuan](https://www.instagram.com/ykesperempuan)  [ykesperempuan](https://twitter.com/ykesperempuan)  [ykp tv](https://www.youtube.com/ykp_tv)